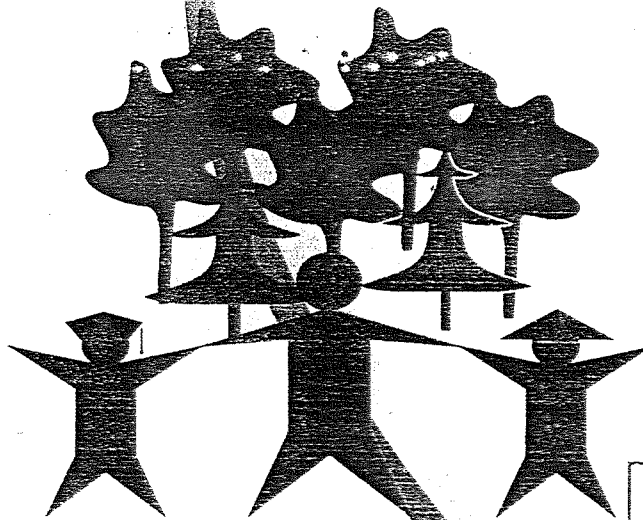




PROSIDING

PEKAN ILMIAH KEHUTANAN NASIONAL III 2005

"Skenario dan Strategi
Pembenahan Kehutanan Indonesia"



Stock opname
2009

Stock opname
2009



**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
FAKULTAS KEHUTANAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

2006

PROSIDING
PEKAN ILMIAH KEHUTANAN NASIONAL III 2005
Skenario dan Strategi Pembenahan
Kehutanan Indonesia

Tim Editor:

Dr. Ir. Sambas Basuni, MS

Herdiansah, S.hut

Shinta Dewi Wisnu W.

Radhimas Firmansyah

Guruh Wisnu Wardhana

Nurbandiah



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
FAKULTAS KEHUTANAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2006

Judul : Prosiding Pekan Ilmiah Kehutanan Nasional III 2005 :
Skenario dan Stategi Pembenahan Kehutanan Indonesia
Editor : Dr. Ir. Sambas Basuni,MS, Herdiansah, S.Hut,
Shinta Dewi Wisnu W.
Penerbit : Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kehutanqn IPB
Tahun penerbitan : Mei 2006 (100 exp.)
Desain isi/sampul : Shinta Dewi Wisnu W.
Jumlah halaman :183 + v

ISBN : 979-99378-3-3
Hak cipta : Penulis

KATA PENGANTAR

Salam Lestari !!!

Segala puji hanya bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas limpahan rahmat, nikmat dan kekuatan-Nya kepada seluruh makhluk di muka bumi ini, sehingga *Prosiding hasil Pekan Ilmiah Kehutanan Nasional III 2005* dapat terselesaikan dengan baik.

PIKNAS III 2005 yang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang Sylva Indonesia Institut Pertanian Bogor (PC Sylva IPB) merupakan cermin kepedulian mahasiswa terhadap kelestarian hutan yang saat ini kondisinya semakin memprihatinkan. Serta sebagai wadah dalam membuka wawasan, menyamakan persepsi dan menghimpun masukan untuk pembangunan kehutanan Indonesia. Tema yang diambil dalam kegiatan ini adalah **"Skenario dan Strategi Pembenahan Kehutanan Indonesia"**, telah menghimpun semua stakeholder kehutanan mulai dari pemerintah, praktisi kehutanan, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat luas.

Prosiding ini berisi kumpulan makalah rangkaian kegiatan Pekan Ilmiah Kehutanan Nasional III 2005. Semoga karya kecil ini mampu memberikan perubahan dan perbaikan serta dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan hutan dan kehutanan Indonesia.

Salam Rimba Lestari !!!

Bogor, Mei 2006

Tim Editor

UCAPAN TERIMA KASIH

Segenap panitia penyelenggara Pekan Ilmiah Kehutanan Nasional III 2005 mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu suksesnya kegiatan tersebut. Izinkan ucapan syukur dan terima kasih kami sampaikan kepada :

1. Menteri Kehutanan Republik Indonesia
 2. Rektor Institut Pertanian Bogor
 3. Dekan dan segenap jajaran pimpinan Fakultas Kehutanan IPB
 4. Direktur Utama Perum Perhutani
 5. Direktorat Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup PBB, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia
 6. Bureau of International Cooperation, Ministry of Forestry
 7. Kejaksaan Agung, Bapak Dr. Marwan Effendy, SH. MM.
 8. Direktur Utama PT Sari Bumi Kusuma, Bapak Nana Suparna
 9. Direktur Utama PT Itchi Kayan Hutani
 10. Ketua Yayasan Adi Sanggoro, Bapak Ngadiyono
 11. Bupati Kutai Kartanegara, Bapak Syaukani H. R.
 12. Bapak Bambang Setiabudi Utomo
 13. Sekretaris Eksekutif FKKM, Bapak Muayat Ali Muhshi
 14. Direktur Urusan Pemerintahan Daerah, Dirjen-Otonomi daerah, DEP DAGRI, Bapak Dr. Made Suwardi, Msoc.sc
 15. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Tumbuhan Rempah dan Obat
 16. Ketua Yayasan Sarana Wanajaya
 17. Ketua Asosiasi Panel Kayu Indonesia (APKINDO)
 18. KBP Lamongan, Bapak Eka Widodo Sugiri
 19. Dosen Fakultas Kehutanan IPB terutama Bapak Hariadi Kartodihardjo, Bapak Ervial AM Zuhud, Ibu Elis Nina Herliyana sebagai pemakalah
 20. Pengurus Cabang Sylva Seluruh Indonesia sebagai peserta PIKNAS III 2005
 21. Lembaga-lembaga kemahasiswaan Fakultas Kehutanan IPB (DPM, BEM, FMCS, Himakova, DKM Ibaadurrahman, AFSA LC IPB, IFSA LC IPB, Rimpala, KSB Masyarakat Roempoet) dan seluruh panitia PIKNAS III 2005 atas kerjakerasnya.
 22. Civitas Akademika Fakultas Kehutanan IPB
 23. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.
- Semoga usaha, doa dan karya kecil ini dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dengan kebajikan yang berlipat ganda. Amin.

Panitia PIKNAS III 2005

SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS KEHUTANAN IPB

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Segala puji hanya bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan kekuatannya, sehingga kegiatan Pekan Ilmiah Kehutanan Nasional III 2005 (PIKNAS III) dapat terlaksana dengan baik.

Saya sangat menyambut baik dengan disusunnya prosiding kegiatan Pekan Ilmiah Kehutanan Nasional III 2005 ini yang merupakan salah satu dari kegiatan kemahasiswaan di Fakultas Kehutanan IPB yang mampu menjadi fasilitator berkumpulnya semua stakeholder kehutanan mulai dari praktisi, akademisi, pemerintah, LSM dan masyarakat untuk duduk bersama membicarakan masalah kehutanan Indonesia saat ini.

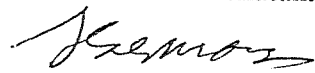
Mahasiswa sebagai *agent of change* dan calon pemimpin masa depan bangsa seyogyanya dibekali bukan hanya ilmu pengetahuan dan teknologi saja, akan tetapi dalam hal ini harus memahami proses perubahan di negara ini, termasuk di dalamnya tentang otonomi daerah dan reformasi di segala bidang kehidupan, kehutanan khususnya. Rimbawan muda harus tanggap terhadap perubahan, bermoral, kreatif dan cerdas.

Dalam era otonomi daerah degradasi hutan ternyata meningkat dua kali lipat dibanding era reformasi (sekitar 2,8 juta Ha/tahun). Fenomena pengelolaan hutan di era otonomi daerah memperlihatkan bahwa pemekaran wilayah berdampak pada kerusakan hutan karena potensi hutan dijadikan sebagai aset untuk memperbanyak Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Permasalahan ini terlihat begitu kompleks dan rumit karena bukan hanya permasalahan kebijakan tentang pengelolaan hutan, tetapi juga permasalahan lemahnya kinerja kelembagaan, lemahnya penegakan hukum, implementasi Undang-undang yang tidak sinkron juga ketidaktegasan usaha mengelola hutan dengan masyarakat.

Harapan keluaran dari hasil kegiatan PIKNAS III ini adalah dapat memberikan gambaran tentang pengelolaan hutan di era reformasi ini dan memberikan masukan bagi para pengambil keputusan serta seluruh stakeholder guna mewujudkan pengelolaan hutan secara adil dan bijaksana agar kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Bogor, Mei 2006
Dekan Fakultas Kehutanan IPB



Prof. Dr. Ir. Cecep Kusmana, MS

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
UCAPAN TERIMA KASIH.....	ii
SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS KEHUTANAN IPB	iii
DAFTAR ISI.....	iv
SIMPOSIUM NASIONAL DUNIA KEHUTANAN.....	1
Kesimpulan dan Rekomendasi.....	2
Sambutan Menteri Kehutanan.....	4
Kebangkitan Menuju Pembenahan dan Pembangunan Kehutanan Indonesia	
Nuralim	8
Kerusakan Hutan dan Pembangunan Kehutanan Di Era Otonomi Daerah	
Sujud Sirajudin, SH. MM	12
Penanggulangan <i>Illegal Logging</i> Pendekatan Secara Sosio Ekonomi Dan Hukum	
Dr. Marwan Effendy, SH. MM	17
Pemberantasan Illegal Logging dan Pembangunan Kehutanan	
Agus Djoko Ismanto	30
Pemberantasan Illegal Logging Di Seluruh Wilayah Indonesia	
Hariadi Kartodihardjo	45
Politik Pengelolaan Hutan Indonesia: Tragedi Penutupan Kelemahan dengan Membesarkan Isu Illegal Logging?	
Nana Suparna	56
Hutan Alam Indonesia Potensi dan Permasalahannya	
Muayat Ali Muhshi	62
Pengelolaan Hutan Di Era Otonomi Daerah	
Dr. Made Suwandi, Msoc.sc	65
Pengelolaan Hutan Di Era Otonomi Daerah	

Herdiansah.....	77
Pengelolaan Hutan Di Era Otonomi Daerah	
Ngadiono.....	82
Pembangkitan Sektor Kehutanan Menuju Pengelolaan Hutan Lestari	
INTERNATIONAL FORESTRY POLICY DIALOGUE AND SIMULATION	90
S. I. Galuh Sekar Arum.....	91
<i>International Forestry Policy for Student</i>	
Dewi Savitri Wahab.....	102
Pembahasan Mengenai Mekanisme Global Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	
Bureau of International Cooperation Ministry of Forestry	110
<i>Implication and Implementation of International Forest Policy Dialogue</i>	
PELATIHAN BUDIDAYA JAMUR TIRAM (<i>Pleurotus sp.</i>).....	135
Ir. Elis Nina Herliyana	136
Jamur Yang Dapat Dimakan Sebagai Komponen Ekosistem Hutan, dan Petunjuk Memburu Jamur Untuk Pemula	
Laboratorium Patologi Hutan Fakultas Kehutanan IPB.....	142
Pelatihan Budidaya Jamur Tiram	
PELATIHAN BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN PASCA PANEN TUMBUHAN OBAT	155
Balai Penelitian Tanaman Obat Dan Rempah.....	156
Tanaman Obat Indonesia	
Dr. Ir. Ervizal AM zuhud, Msi.....	165
Kembali Ke Azas: "Prinsip Sistem Kedirian"	
LAMPIRAN.....	178

SIMPOSIUM NASIONAL DUNIA KEHUTANAN



KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

SIMPOSIUM NASIONAL DUNIA KEHUTANAN PEKAN ILMIAH KEHUTANAN NASIONAL III 2005

"Kebangkitan Menuju Pembenahan dan Pembangunan Kehutanan Indonesia"

Berdasarkan hasil penyampaian materi dan diskusi dihari pertama Simposium Nasional Dunia Kehutanan, Sidang Komisi I yang membahas tentang "Pemberantasan Illegal Logging dan Tindak Lanjut Pembangunan Kehutanan Indonesia" menghasilkan kesimpulan bahwa akar masalah illegal logging antara lain :

1. Lemahnya kinerja birokrasi.
2. Ketidakpastian hak atas hutan negara.
3. Implementasi Undang-undang yang tidak sinkron.
4. Ketidaktegasan upaya pemberdayaan masyarakat lokal.
5. Lemahnya penegakan hukum.

Melihat permasalahan-permasalahan di atas., strategi yang ditawarkan kepada pemerintah antara lain :

1. Perlunya lembaga yang bertugas memantau pemberantasan illegal logging dan memantau pemberian izin perusahaan hutan dan konversi alam.
2. Perlunya peninjauan ulang dan ketegasan instansi pemerintah dalam penetapan tata batas hutan negara, hutan hak dan hutan adat yang disosialisasikan kepada masyarakat.
3. Masyarakat berhak memanfaatkan hutan negara sepanjang tidak merugikan negara dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Mensinkronkan UU Kehutanan dan UU lainnya yang berhubungan dengan pelanggaran tindak illegal logging, agar dari proses tersebut pelaku illegal logging dapat dihukum dengan seberat-beratnya sehingga menimbulkan efek jera.
5. Pemerintah, baik pusat maupun daerah perlu memberikan bantuan modal secara intensif terarah yang disertai dengan evaluasi secara bertahap dalam upaya mensejahterakan masyarakat sekitar hutan.
6. Memberikan pelayanan pendidikan secara terpadu (pendidikan formal dan kehutanan dengan target yang jelas.
7. Perlu adanya ketegasan hukum oleh instansi pemerintah terhadap pelaku dan pendukung tindak illegal logging.
8. Perlu amandemen UU 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang disesuaikan dengan keadaan hukum masa kini dan mendatang yang disosialisasikan kepada seluruh elemen masyarakat.
9. Percepat proses hukum bagi pelaku illegal logging dengan adil.

Sidang Komisi II mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam pengelolaan hutan di era otonomi daerah, antara lain :

1. Pemerintah belum siap melakukan otonomi di bidang kehutanan, karena belum adanya reformasi birokrasi kehutanan dan perindustrian SDM, tugas dan wewenang dari pusat ke daerah.
2. PEMDA masih menganggap bahwa pemanfaatan hutan adalah sebatas kayu, sehingga hutan dieksploitasi untuk mengejar Pendapatan Asli Daerah dengan dalil kemakmuran rakyat.
3. Minimnya penguasaan teknologi industri kehutanan dalam pemanfaatan Sumber Daya Hutan khususnya hasil hutan non kayu.
4. Otonomi daerah menimbulkan dampak yang luas di bidang POLEKSOSBUD dan Ekologi kehutanan.

Dari permasalahan-permasalahan diatas, solusi yang direkomendasikan kepada pihak pengelola hutan era otonomi daerah meliputi :

1. Tingkatkan kemampuan daerah dalam pengurusan dan pengelolaan melalui pembagian wewenang dan tugasnya masing-masing dengan pembentukan biro-biro atau subdirjen seperti yang berada di pusat dengan memperhatikan kualitas dan kuantitas SDM terhadap potensi hutan yang ada pada daerah tersebut dengan monitoring secara terpadu dan kontinyu.
2. Pembentukan peraturan/perundangan mengenai pendistribusian peranan dan wewenang dari pusat ke daerah untuk mengatur dan mengelola hutan di daerah yang lebih konkrit.
3. Tingkatkan kegiatan penelitian, pengembangan dan IPTEK dalam bidang pengolahan hasil hutan khususnya hasil hutan non kayu dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
4. Optimalisasi pembangunan HTI dan ekowisata sebagai salah satu usaha revitalisasi industri untuk keberlangsungan industri kehutanan, pendapatan asli daerah dan pendapatan masyarakat dengan memperhatikan kesesuaian lahan di daerah tersebut.
5. PEMDA membuat skala prioritas terhadap usaha pelestarian hutan dengan rehabilitasi hutan dan lahan kritis sesuai dengan pengusahaan dana dari pendapatan asli daerah dan pusat dalam rangka merealisasikannya.

Bogor, 6 September 2005

Delegasi Mahasiswa Kehutanan Seluruh Indonesia

SAMBUTAN MENTERI KEHUTANAN
PADA SIMPOSIUM NASIONAL
PEKAN ILMIAH KEHUTANAN NASIONAL III (PIKNAS III)

**“KEBANGKITAN MENUJU PEMBENAHAN DAN
PENBANGUNAN KEHUTANAN INDONESIA”**

Bogor, 5 September 2005

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saudara Jaksa Agung yang terhormat,
Saudara Direktur Jenderal Otonomi Daerah Depdagri,
Hadirin peserta simposium yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan HidayahNya sehingga kita dapat hadir pada Simposium Nasional sebagai salah satu rangkaian kegiatan PIKNAS III tahun 2005 dengan tema “Kebangkitan Menuju Pembenaan dan Pembangunan Kehutanan Indonesia”.

Seperti telah kita ketahui bersama bahwa kehutanan telah memberi sumbangan yang besar bagi pembangunan nasional Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selama tiga dasawarsa terakhir, sumber daya hutan telah menjadi modal utama pembangunan nasional, yang memberikan dampak positif antara lain terhadap peningkatan devisa, penyerapan tenaga kerja dan mendorong pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi.

Namun demikian, pemanfaatan hasil hutan kayu secara berlebihan dan besarnya perubahan kawasan hutan untuk kepentingan non-kehutanan telah menyebabkan berbagai permasalahan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Adanya pemanfaatan kayu yang tidak mengikuti azas kelestarian meyebabkan degradasi sumber daya hutan yang cukup besar sehingga secara teori posisi kita sangat sulit untuk mengembalikan status hutan seperti sebelumnya. Data menunjukkan antara tahun 1997-2003 laju degradasi hutan diperkirakan seluas 2,38 juta hektar per tahun.

Saudara-saudara peserta Simposium yang saya hormati,

Berbagai upaya telah, sedang dan terus dilakukan untuk menangani permasalahan di bidang kehutanan. Untuk memenuhi mandat UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan, maka Departemen Kehutanan telah menetapkan visi pembangunan kehutanan yaitu: Terwujudnya Penyelenggaraan Kehutanan Untuk Menjamin Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kemakmuran Rakyat.

Dengan visi diatas maka misi Departemen Kehutanan dalam pembangunan kehutanan ditetapkan sebagai berikut:

1. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
2. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan dan ekosistem perairan yang meliputi fungsi konservasi, lindung dan produksi kayu, non kayu dan jasa lingkungan untuk mencapai manfaat lingkungan sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari;
3. Meningkatkan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS);
4. Mendorong peran serta masyarakat;
5. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan;
6. Memantapkan koordinasi antara pusat dan daerah.

Dengan misi tersebut diharapkan sumberdaya hutan akan dapat dikelola sesuai daya dukungnya; kondisi ekonomi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan sumberdaya hutan diharapkan akan meningkat; produk hukum di bidang kehutanan yang berkeadilan ditegakkan dan diterapkan secara konsisten; kewenangan dan tanggung jawab di bidang kehutanan di delegasikan secara bertahap kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan di bidang kehutanan; dan pengelolaan sumberdaya hutan yang optimal didukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sumberdaya manusia yang professional dan sarana/prasarana yang memadai.

Saudara-saudara sekalian,

Untuk mencapai sasaran pembangunan kehutanan jangka menengah, Departemen Kehutanan menetapkan lima kebijakan prioritas periode 2005-2009 yaitu :

1. Pemberantasan pencurian kayu di hutan Negara dan perdagangan kayu illegal;
2. Revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan;
3. Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya hutan;
4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan;
5. Pemantapan kawasan hutan.

Lima kebijakan prioritas tersebut diatas merupakan paket kebijakan yang tidak bias dipisahkan antara satu dan lainnya. Urutan kebijakan yang saya sampaikan bukan merupakan urutan prioritas. Ini perlu saya sampaikan karena antara satu kebijakan dengan dengan kebijakan yang lain sangat erat keterkaitannya.

Upaya penerapan kebijakan penanggulangan illegal logging dan perdagangan kayu illegal pada prinsipnya tidak akan pernah efektif kalau tidak diikuti dengan upaya dalam memperbesar supply kayu melalui reboisasi dan rehabilitasi hutan serta restrukturisasi industri kehutanan. Demikian pula dengan elemen kebijakan prioritas lainnya. Intinya adalah bahwa ke-5 kebijakan prioritas tersebut diarahkan untuk

dapat mewadahi langkah selanjutnya dalam pemecahan masalah kehutanan yang sedang kita hadapi saat ini dan saat mendatang.

Saudara-saudara peserta simposium yang saya hormati,

Sesuai dengan judul sambutan saya ini, yaitu Kebangkitan Menuju Pembenahan dan Pembangunan Kehutanan Indonesia, maka saya berharap banyak dari simposium ini. Simposium Pekan Ilmiah Kehutanan Nasional (PIKNAS) ke III ini menurut hemat saya sangat tepat waktunya dikaitkan dengan upaya membangun kembali citra pengelolaan hutan dan kehutanan di Indonesia.

Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa telah ada upaya pembenahan untuk membangkitkan kembali pembangunan hutan. Namun terus terang saya juga ingin menyampaikan bahwa upaya pembenahan yang kita lakukan pada tingkatan tertentu belum menunjukkan hasil yang segera karena berbagai kendala mulai dari aspek hukum, kelembagaan bahkan politik. Dalam konteks ini saya bertekad akan terus menerus melakukan pembenahan yang diperlukan guna menjamin berlangsungnya pembangunan kehutanan masa depan sebagai bagian dari pembangunan Nasional.

Saudara-saudara peserta simposium yang saya hormat,

Rasanya sudah menjadi suatu kebiasaan bahwa pada saat kita dihadapkan pada permasalahan yang kompleks dan multidimensional, pada saat itu pula kita baru berpaling tentang perlu dan pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu pada forum yang ilmiah ini saya mengharapkan agar kita mempunyai komitmen untuk menempatkan IPTEK sebagai bagian integral dari upaya-upaya kita untuk keluar dari permasalahan yang kita hadapi. Pernyataan Gro. H. Bruntland yaitu "Bahwa satu-satunya dasar pembuatan kebijakan yang tepat, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam adalah factor-faktor ilmiah yang ada. Tanpa itu maka kebijakan yang diambil sangat beresiko menciptakan bencana", merupakan pernyataan filosofi yang harus kita tanamkan pada saat kita dihadapkan pada proses pengambilan keputusan.

Beberapa waktu yang lalu Bapak Presiden Susilo Bambang Yudoyono sendiri mengemukakan betapa penting dan sentralnya posisi IPTEK dalam memajukan sebuah negara. Di Indonesia selama ini pengembangan IPTEK cenderung kita pandang sebagai sebuah pengeluaran tanpa manfaat. Anggaran untuk pengembangan IPTEK secara nasional baru sebesar 0.05 % atau satu per dua puluh ribu saja dari total GDP, termasuk salah satu terendah di dunia. Bandingkan misalnya dengan Malaysia yang sekitar 1 % dari GDP. Jangan sebut Negara seperti Korea, Taiwan, Singapura apalagi Jepang dan Amerika Serikat. Hal yang sama terjadi di bidang kehutanan. Memang, kiprah kita mengelola hutan selama tiga dasawarsa yang lalu, tidak memerlukan IPTEK. Tidak diperlukan terobosan teknologi untuk menjadi pengeksport kayu bulat atau kayu lapis terbesar di dunia. Yang diperlukan hanya modal untuk menambang

*Sambutan Menteri Kehutanan - Kebangkitan Menuju Pembenahan
dan Pembangunan Kehutanan Indonesia*

kayu. Tindakan tersebut memang dalam jangka pendek telah menghasilkan devisa yang besar, sehingga kita teninabobokan, karena logika berfikir bahwa apa yang dilakukan sudah benar yang berakibat kita tidak peduli dengan upaya-upaya penguasaan IPTEK kehutanan.

Untuk itu melalui forum terhormat ini saya menghimbau agar kita jangan sampai terjebak dan mengulangi kesalahan sebelumnya.

Demikian pokok-pokok pemikiran dalam pembangunan kehutanan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini akan dapat membuka wawasan kita tentang betapa kompleksnya permasalahan kehutanan yang kita hadapi saat ini dan masa mendatang. Akan tetapi, saya berharap agar kita bersama-sama memikirkan pemecahan yang membuat hutan kita lestari dan sekaligus menyejahterakan masyarakat demi kejayaan bangsa Indonesia.

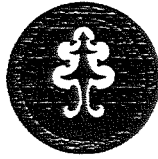
Akhir kata, saya sampaikan selamat bersimposium dan semoga Allah SWT memberikan Rahmat-Nya bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Menteri Kehutanan

H. M. S. Kaban

PEMBERANTASAN ILLEGAL LOGGING DI SELURUH WILAYAH INDONESIA



**DEPARTEMEN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PHKA
DIREKTORAT PENYIDIKAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN**

Sept 2005

Perkenalan

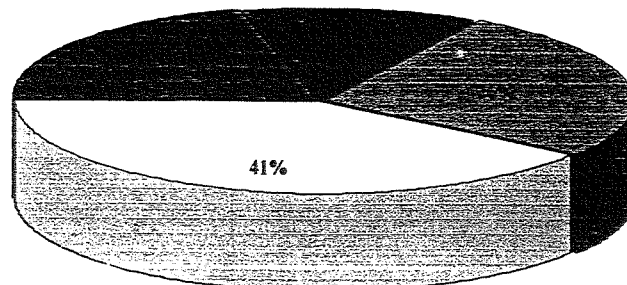
Agus Djoko Ismanto (E161158/L1984)

Pegawai Departemen Kehutanan (1995)

**Kepala Sub-Direktorat : Program dan
Evaluasi Penyidikan dan Perlindungan
Hutan**

Direktorat Jenderal PHKA

KONDISI HUTAN SAAT INI



■ HT LINDUNG (29,1 JT HA) □ HT PRODUKSI (43,95 JT HA)
■ HT KONSERVASI (23,24 JT HA) ■ HT KONVERSI (13,67 JT HA)

KWS HUTAN TERDEGRADASI : 59,7 JT HA; 1,6 – 2,8 JT HA/TH
KWS HUTAN YG PERLU DIREHABILITASI ; 47,1 JT HA

- HT LINDUNG : 10,4 JT HA
- HT KONSERVASI : 4,6 JT HA
- HT PRODUKSI : 32,1 JT HA

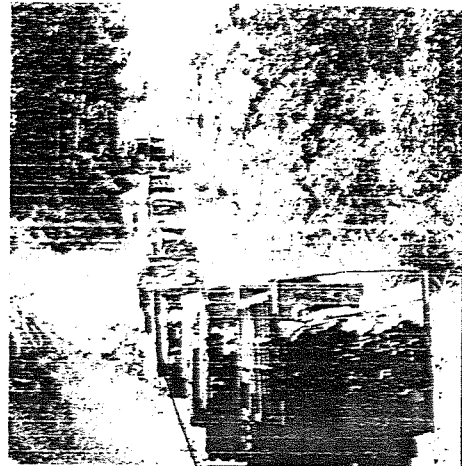
(SUMBER : INDIKASI LOKASI REHABILITASI HUTAN & LAHAN, BAPLAN TH 2003)

ANALISIS BERBAGAI PIHAK TENTANG IL DI INDONESIA

- EARNES & YOUNG (1999) : 52 % konsumsi kayu di Indonesia berasal dari illegal logging
- DFID (1999) : 57 jt m3 dari 78 jt m3 total produksi kayu Indonesia berasal dari illegal logging
- GREENPEACE (2003) : 79 jt m3 dari 90 jt m3 kebutuhan nasional berasal dari illegal logging
- DEPHUT (2001) : Defisit BB industri 50,7 jt m3 berasal dari illegal logging = kerugian negara dari PSDH/DR sebesar Rp. 30,4 Trilyun

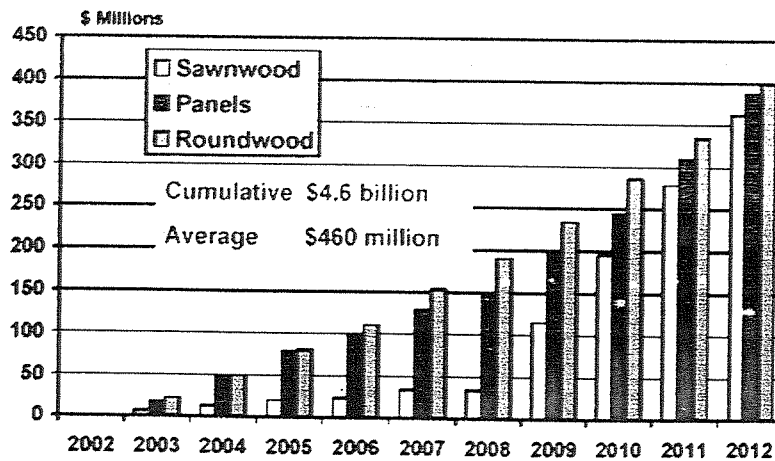
DIMANA ILLEGAL LOGGING BERAPA JUMLAH & KERUGIAN

- ❑ TERJADI di hutan produksi, dan sudah merambah ke hutan lindung dan hutan konservasi.
- ❑ HASIL penelitian berbagai pihak : Kayu illegal mencapai 50 juta m³/th
- ❑ ANALISIS kerugian negara dari berbagai pihak : Rp 30 triliyun/th.



Illegal logging di Kawasan Konservasi

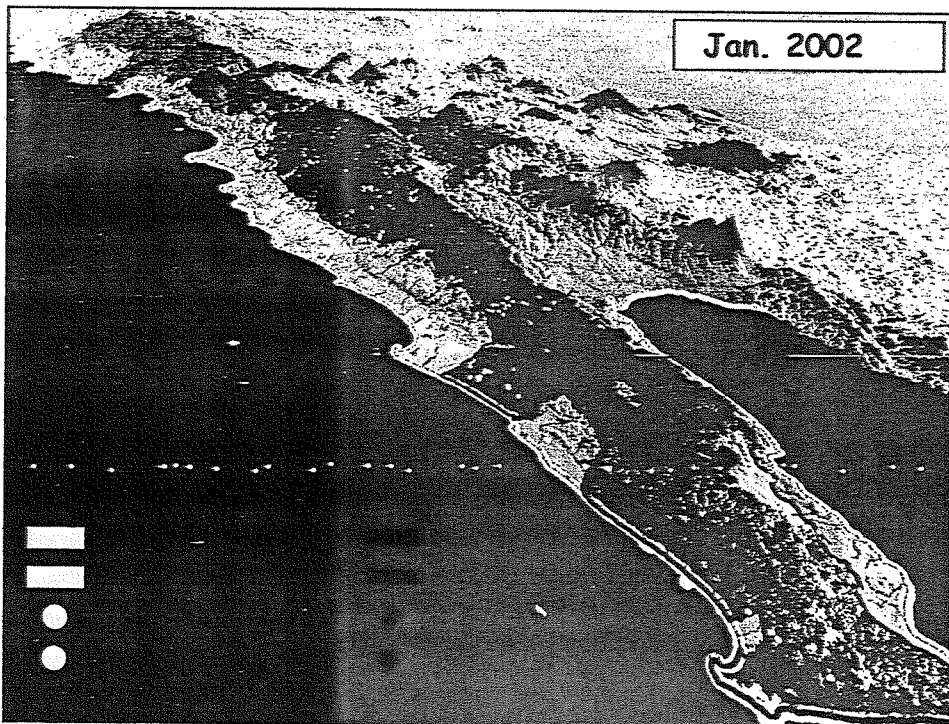
Increase in US Wood Product Exports due to Elimination of Illegal Logging

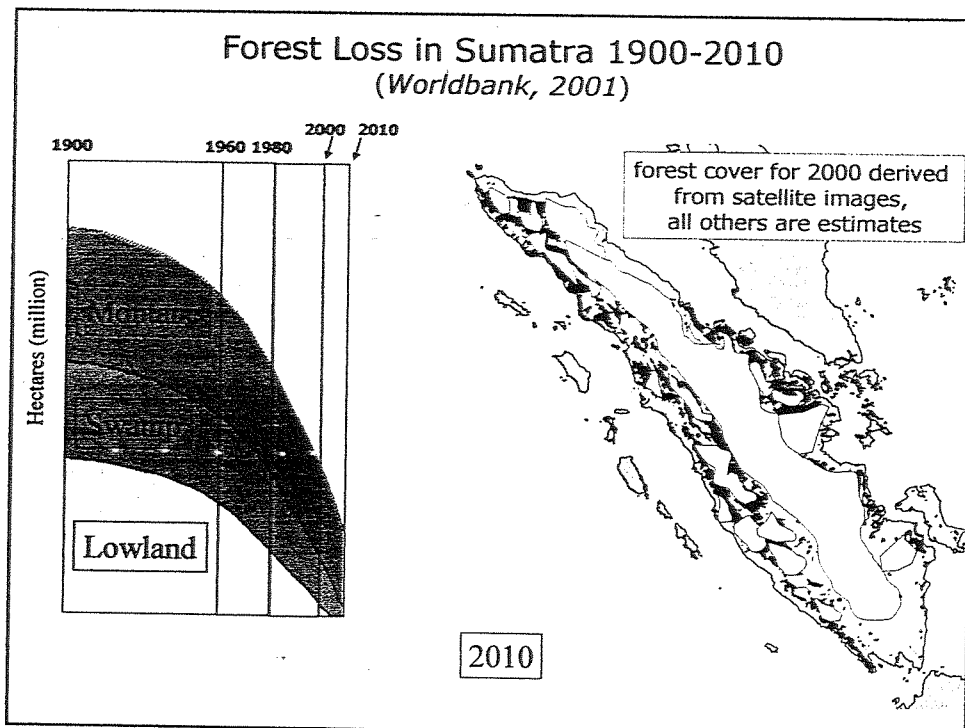
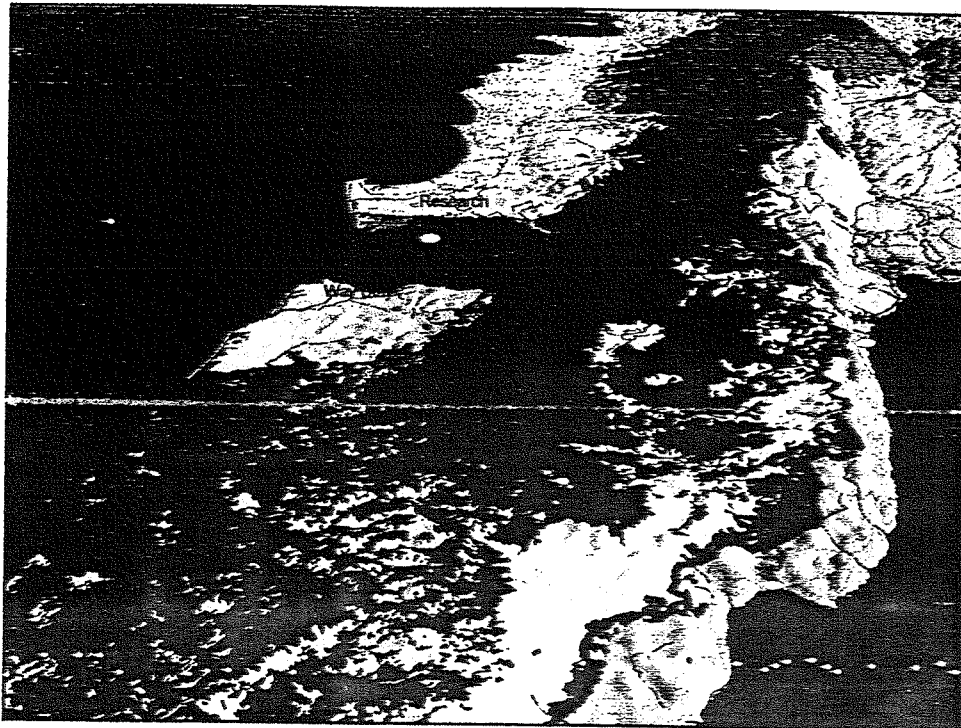


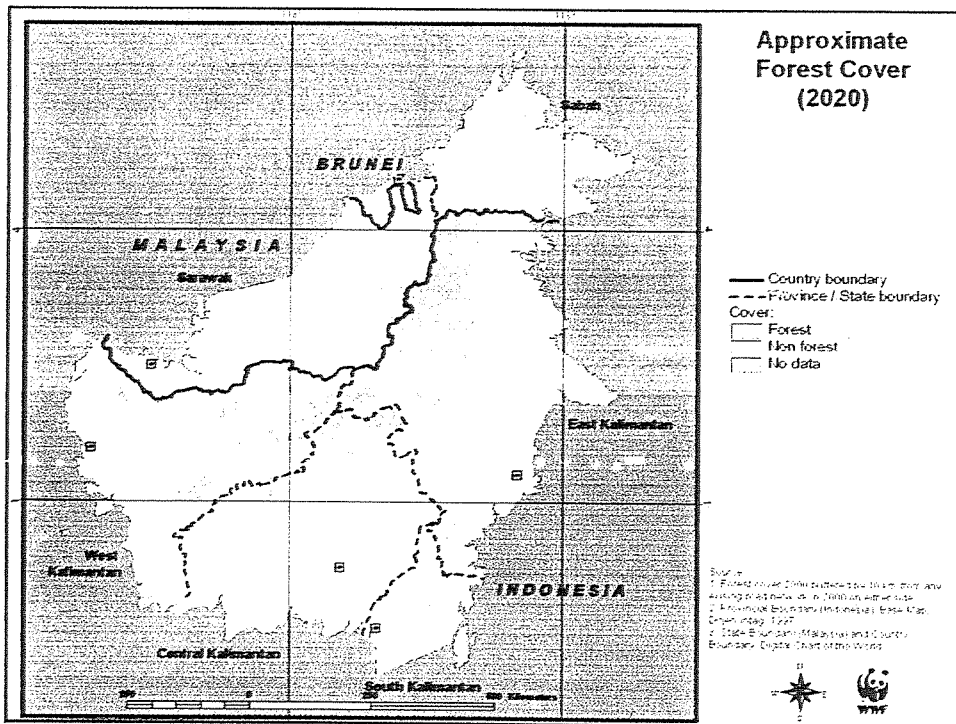
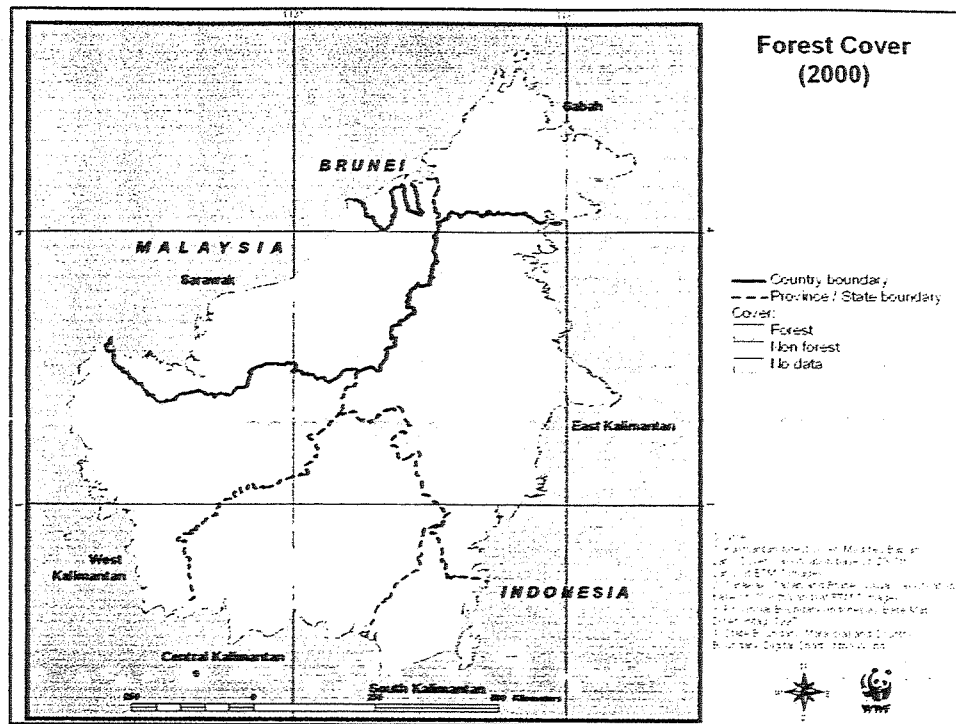
Mengapa

Property Right - Inefficiency

- (a) *Universality,*
- (b) *Exclusivity,*
- (c) *Transferability,*
- (d) *enforceability*





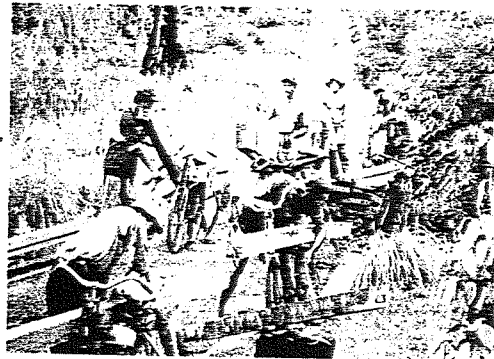


Public Good & Externality

- Ada Produk (barang dan Jasa) hasil pengelolaan hutan, yang tidak ditransaksikan → Disinsentif bagi PHL
- Ada Pihak yang tidak terlibat dalam pengelolaan hutan tetapi menanggung beban (negatif) yang ditimbulkan

SIAPA PELAKU UTAMA ILLEGAL LOGGING

- **CUKONG**
- **OKNUM APARAT**
- **MASYARAKAT**



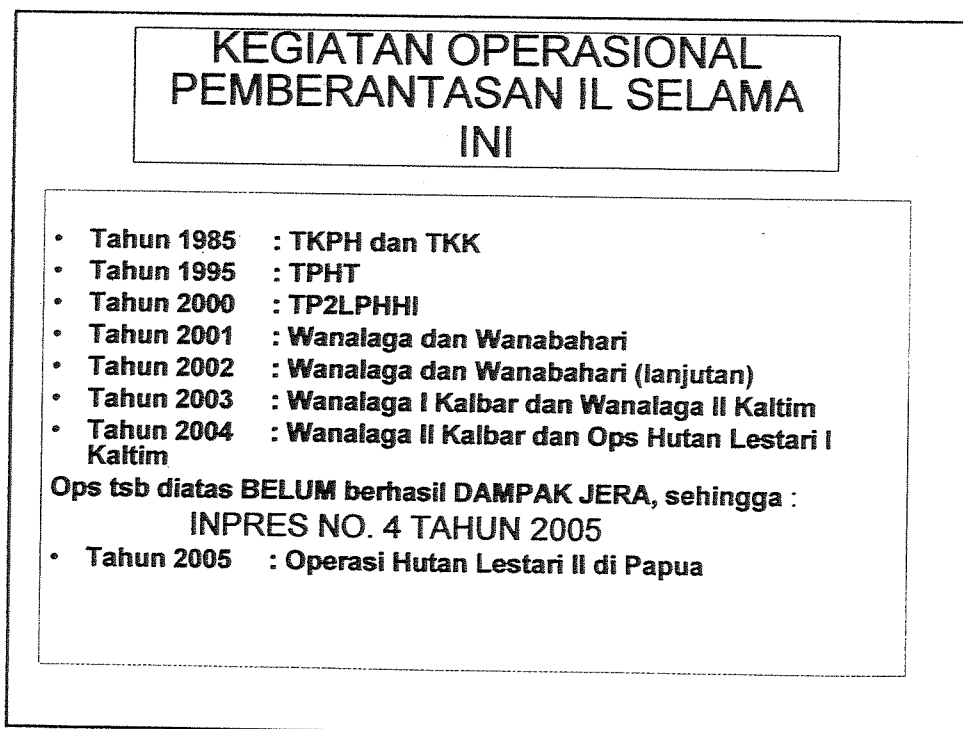
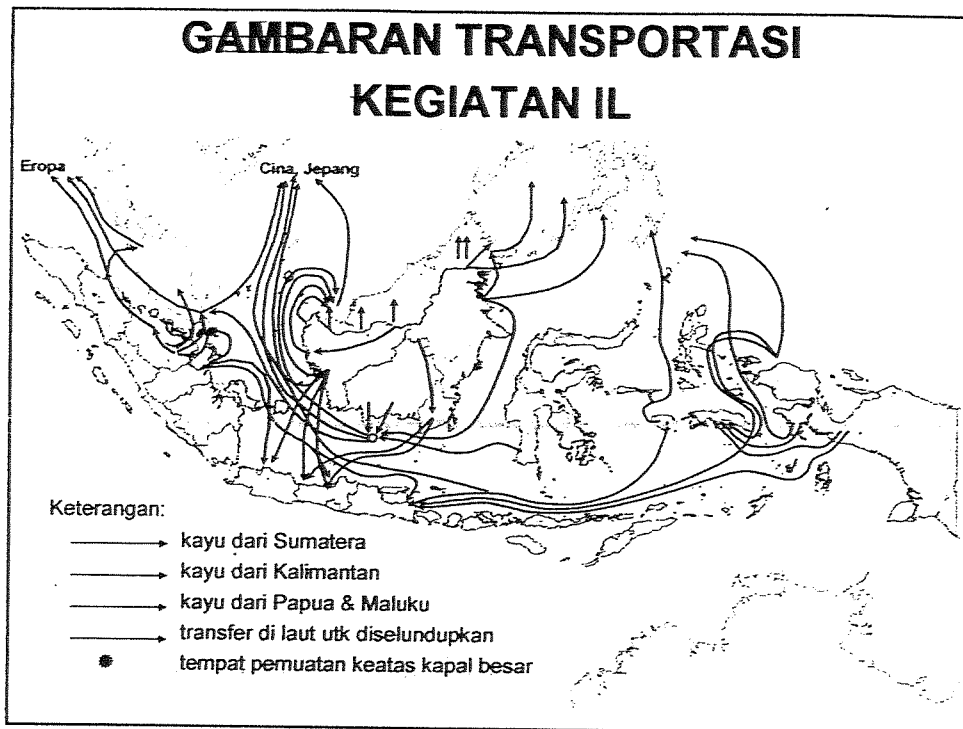
Keterlibatan Masyarakat dalam illegal logging

MODUS OPERANDI ILLEGAL LOGGING

- **PENYUAPAN**
 - Memberi uang/hadiah
 - Membiayai *backing* dan pengawal
 - Membiayai massa utk membenaran/unjuk rasa
- **PENYALAHGUNAAN WEWENANG**
 - Kolusi penerbitan ijin tebang
 - Kolusi penerbitan dan perpanjangan SKSHH
 - Manipulasi asal usul kayu dan produksi
 - Manipulasi ijin peralatan

MODUS OPERANDI ILLEGAL LOGGING (Lanjutan)

- **PENYALAHGUNAAN DOKUMEN**
 - Dokumen SKSHH palsu/aspal/terbang
 - Penggunaan SKSHH untuk mendukung penyelundupan ke LN
- **PENYELUNDUPAN**
 - Melalui laut antar pulau dan ke LN
 - Melalui darat(daerah perbatasan di Kalimantan)
 - Manfaatkan sistem pasar antar negara
- **TEBANGAN & PENGANGKUTAN TANPA IJIN**
 - Penebangan dan pengangkutan tanpa ada dokumen (Perambahan, penebangan dan pengangkutan liar)



KEGIATAN PENDUKUNG PEMBERANTASAN IL

- **Pemberantasan IL dalam Renstra Dephut 2005-2009**
- **5 Program Prioritas Dephut 2005-2009**
- **Pembentukan Kelompok Kerja Terpadu Pemberantasan Illegal Logging Pusat (Ketua Menkopolhukam)**
- **Membuat MOU dengan PPAK dan ICW**
- **Menyerahkan 40 nama Target Operasi (TO) Pemberantasan IL**
- **Aktif Sosialisasi Inpres No. 4/2005 dan Peraturan Kehutanan**
- **Menggalang kerjasama dgn negara tetangga/negara konsumen kayu (AFP, FLEGT), dan LSM nasional/internasional**
- **Meningkatkan koordinasi dgn Aparat/Instansi terkait pusat/daerah**
- **Membenahi organisasi dan personil Polhut, PPNS dan Petugas Teknis Kehutanan (P2LHP, P2SKSHH, P3KKB)**

INTSTRUKSI PRESIDEN NO. 4 TH. 2005

Kpd 18 Instansi/Pejabat di Pusat/Daerah utk :

- **Melakukan percepatan pemberantasan IL**
- **Penindakan thdp setiap org atau badan yang melakukan IL (a,b,c,d,e)**
- **Menindak tegas dan memberi sanksi kepada oknum petugas yg terlibat IL**
- **Melakukan kerjasama dan Koordinasi**
- **Manfaatkan informasi dari masyarakat**
- **Menangani segera barang/alat bukti**
- **Instruksi khusus kepada masing-masing 18 instansi/pejabat di Pusat/daerah**

SASARAN PEMBERANTASAN ILLEGAL LOGGING

(Inpres No. 4 th 2005)

Setiap **ORANG** atau **BADAN** yang melakukan :

- Menebang, memanen atau memungut HHK dari kws hutan tanpa ijin/hak.
- Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, memiliki atau menggunakan HHK yg diduga dipungut scr tdk sah
- Mengangkut, menguasai atau memiliki HHK tdk dilengkapi bersama sama SKSHH
- Membawa albat dan alat lainnya yg lazim atau patut diduga akan digunakan utk mengangkut HHK di dlm kws hutan tanpa izin dari berwenang
- Membawa alat yg lazim digunakan utk menebang, memotong atau membelah pkn dlm kws hutan tanpa ijin pejabat berwenang

INSTRUKSI PRESIDEN NO. 4 TH. 2005

Kpd **GUBERNUR** seluruh Indonesia :

- Mencabut & merevisi PERDA/Kpts Gub. yg bertentangan dg peraturan di bid kehutanan
- Membentuk & memerintahkan Satgas Prop melaks ops preventif dan represif pemberantasan IL
- Mencabut IUPHHK yg tih dikeluarkan dan bertentangan dg peraturan yg berlaku
- Mencabut Ijin Usaha Industri Pengolahan Kayu yg memanfaatkan kayu illegal dn proses hukum
- Meningkatkan DALWAS pelaksanaan pemberantasan IL & peredarannya
- Mengalokasikan BIAYA OPS melalui APBD
- Melaporkan pelaksanaan Kegiatan Ke Menkopolhukam

INTSTRUKSI PRESIDEN NO. 4 TH. 2005

Kpd **BUPATI/WALIKOTA** seluruh Indonesia :

- Mencabut & merevisi PERDA/Kpts Bup/Wako yg bertentangan dg peraturan di bid kehutanan
- Membentuk & memerintahkan Satgas Kab/Kota melaks ops preventif dan represif pemberantasan IL
- Mencabut IUPHHK yg telah dikeluarkan & bertentangan dg peraturan yg berlaku
- Mencabut Ijin Usaha Industri Pengolahan Kayu yg memanfaatkan kayu illegal & proses hukum sesuai kewenangannya
- Mengawasi intensif kinerja P2SKSHH diwilayahnya
- Mengalokasikan BIAYA OPS melalui APBD
- Menerbitkan PERDA yg mengatur peredaran, kepemilikan dan penggunaan chainsaw dan sejenisnya
- Melaporkan pelaksanaan Kegiatan Ke Menkopolkam melalui Gub

18 INSTANSI MATA RANTAI PEMBERANTASAN ILLEGAL LOGGING & ILLEGAL TRADE



Kewenangan POLHUT & PPNS

- **POLHUT**
 - Patroli di dalam kawasan atau wilayah hukumnya
 - Memeriksa surat atau dokumen
 - Menerima laporan tindak pidana
 - Mencari keterangan dan barang bukti
 - Menangkap tangan
 - Membuat laporan dan menanda tangani

- **PPNS**
 - Memeriksa kebenaran laporan atau keterangan
 - Memeriksa orang yang diduga melakukan tindak pidana kehutanan
 - Memeriksa tanda pengenal orang yang masuk hutan
 - Menggeledah dan menyita barang bukti
 - Meminta keterangan dan barang bukti
 - Menangkap dan Menahan orang
 - Membuat dan Menandatangani BAP
 - Menghentikan penyidikan

V I S I

Tertib, Aman, Terlindungi

Tewujud ketertiban, keamanan dan perlindungan hak-hak perorangan, masyarakat dan negara atas hutan dan hasil hutan, dan hak-hak hidup tumbuhan dan satwa liar untuk mendukung pencapaian pengelolaan hutan lestari dan kesejahteraan masyarakat.

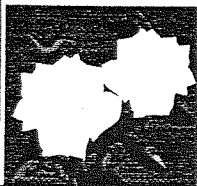
M I S I

- Mendukung penegakan dan penyadaran hukum dengan memfasilitasi pencapaian P21
- Mendukung pengamanan dan perlindungan hak-hak atas hutan dan hasil hutan dengan meningkatkan kapasitas POLHUT dan PPNS
- Melengkapi SARPRAS Penyidikan dan Perlindungan Hutan
- Mengoptimalkan Inpres no 4 tahun 2005
- Mendukung penciptaan akuntabilitas pemerintah kepada publik

PRIORITAS CAPAIAN

1. Penanganan Perkara Strategik
 1. **Besar dampak politik, psikologik, ekonomik, ekologik,**
 2. **Esensial bagi kelestarian dan kehidupan**
2. **Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PAMHUT**
 1. Pembentukan Satuan POLHUT Reaksi Cepat (**SPORC**)
 2. Peningkatan Kapasaitas POLHUT dan PPNS
 3. Pemeruihan sarana minimal POLHUT dan PPNS
 4. Standard Operasi, Kegiatan dan Pembiayaan Minimal Penyidikan dan Perlindungan Hutan
3. Percepatan Pemberantasan Illegal Logging (Inpres no 4 tahun 2005)
4. Pengembangan Jaringan Kerjasama Nasional dan Internasional

TERIMA KASIH



PENGELOLAAN HUTAN DI ERA OTONOMI DAERAH

**MUAYAT ALI MUHSI
SEKRETARIS EKSEKUTIF FKKM**

DESENTRALISASI DALAM PENGELOLAAN HUTAN

- **KELELUASAAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENETAPKAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS**
- **PILKADA MEMBUAT PEMDA LEBIH KUAT DAN LEGITIMATE**
- **BELUM ADA FORMAT DESENTRALISASI PENGELOLAAN HUTAN YANG MENJAMIN KELESTARIAN HUTAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**
- **TARIK MENARIK KEPENTINGAN DAN PEREBUTAN OTORITAS ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH**

KETEGANGAN PUSAT VS DAERAH

- **PP NO. 6/1999 DIREVISI PP NO.34/2002**
- **PERDA WONOSOBO NO.22/2001 DICABUT SK MENDAGRI MEI 2004**
- **IPKMA VS OPERASI LESTARI II**

TATA HUBUNGAN PUSAT - DAERAH

- **DIALOG PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH**
- **PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH**
- **PEMERINTAH PUSAT SEBAGAI FASILITATOR PENDAMPING PEMDA (Informasi, bantuan teknis, monitoring dan supervisi, penegakan hukum)**

OTONOMI LOKAL

DALAM PENGELOLAAN HUTAN (HKm)

- **IDENTIFIKASI MASYARAKAT DAN PENETAPAN WILAYAH KELOLA MASYARAKAT**
- **PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT**
- **PEMBERIAN HAK PEMAMFAATAN DAN PENGELOLAAN HUTAN**
- **PENGEMBANGAN USAHA MASYARAKAT (akses modal, teknologi, pasar)**

FKKM

- FORUM KOMUNIKASI KEHUTANAN MASYARAKAT (FKKM) DIDIRIKAN PADA TGL 24 SEPTEMBER 1997 DI FAHUTAN UGM SEBAGAI FORUM DIALOG DAN MEDIA BELAJAR MULTIPihak MENGENAI KEHUTANAN MASYARAKAT (KM)**
- MSI FKKM MENDORONG GERAKAN KM DI INDONESIA DAN Mendukung DAN Mendukung PROSES-PROSES PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KM MELALUI PENYEBARAN INFORMASI, PENGEMBANGAN KONSEP, PENGANTAN KAPASITAS DAN PERUMUSAN KEBIJAKAN**
- FKKM TERDIRI DARI UNSUR PEMERINTAH, PERGURUAN TINGGI, PENGUSAHA, MASYARAKAT, LSM, DAN KONSULTAN KEHUTANAN**
- FKKM TERSEBAR DI 14 PROPINSI : Sumbar, Riau, Jambi, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Jogjakarta, Jawa Timur, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara**

PENGELOLAAN HUTAN DI ERA OTONOMI DAERAH

**DALAM KORIDOR UU 32 TAHUN 2004
TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH**

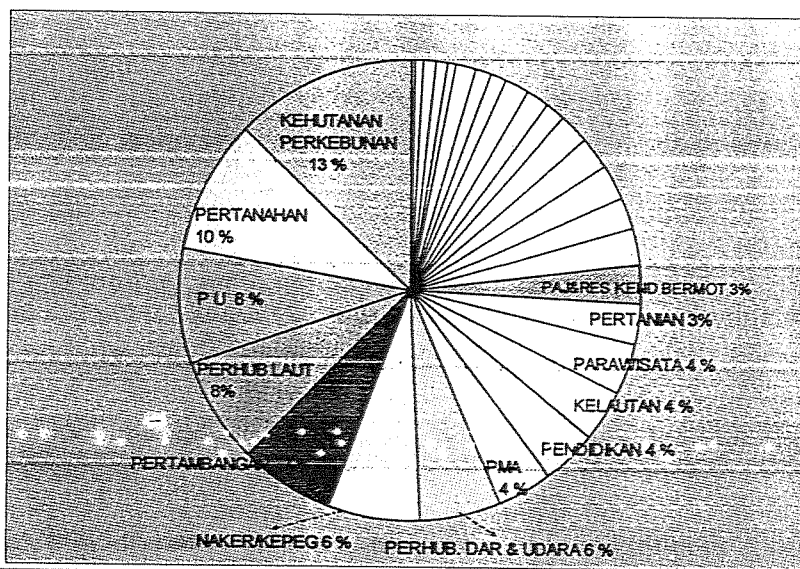
OLEH:

**DR.MADE SUWANDI Msoc.sc
Direktur Urusan Pemerintahan Daerah
DITJEN OTDA - DEPDAGRI**

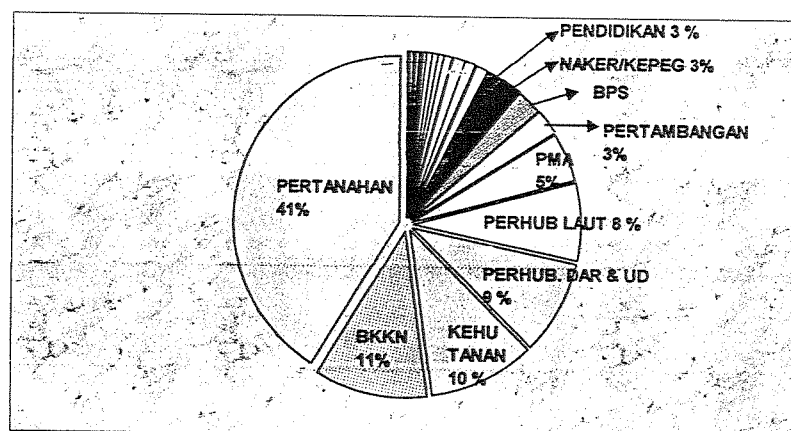
ELEMEN DASAR PEMERINTAHAN DAERAH

- 1. KEWENANGAN DAERAH**
- 2. KELEMBAGAAN DAERAH**
- 3. KEPEGAWAIAN DAERAH**
- 4. KEUANGAN DAERAH**
- 5. PERWAKILAN**
- 6. PELAYANAN PUBLIK**
- 7. PENGAWASAN**

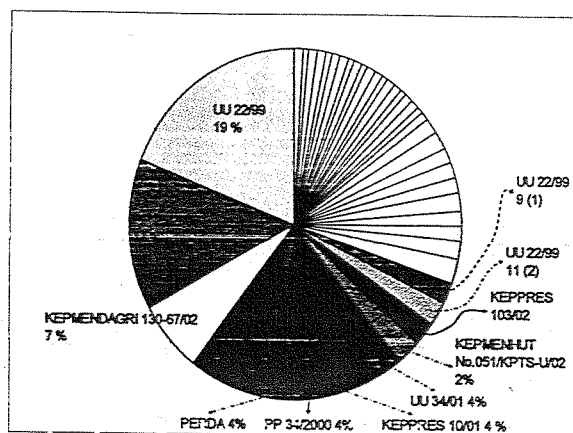
TUMPANG TINDIH KEWENANGAN ANTARA PROVINSI VV KAB/KOTA



TUMPANG TINDIH ANTARA PUSAT VV DAERAH



PENYEBAB TUMPANG TINDIH



LANJUTAN PENYEBAB TUMPANG TINDIH

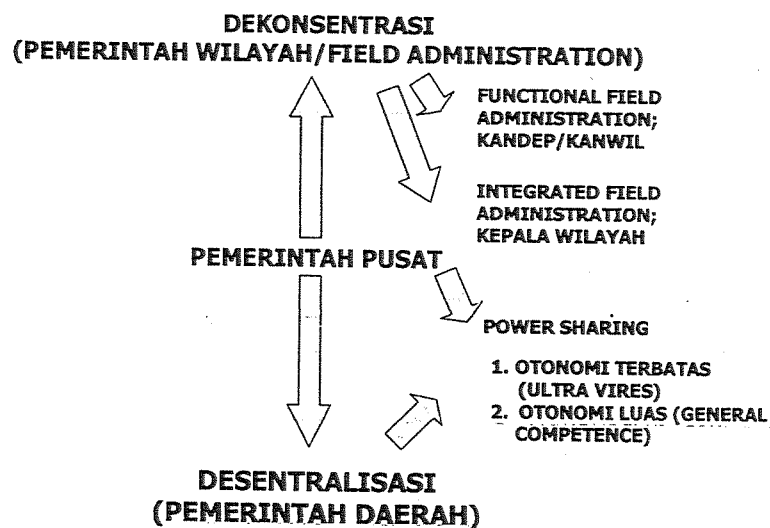
Sumber Tumpang Tindih Kawasan Industri dan Perumahan

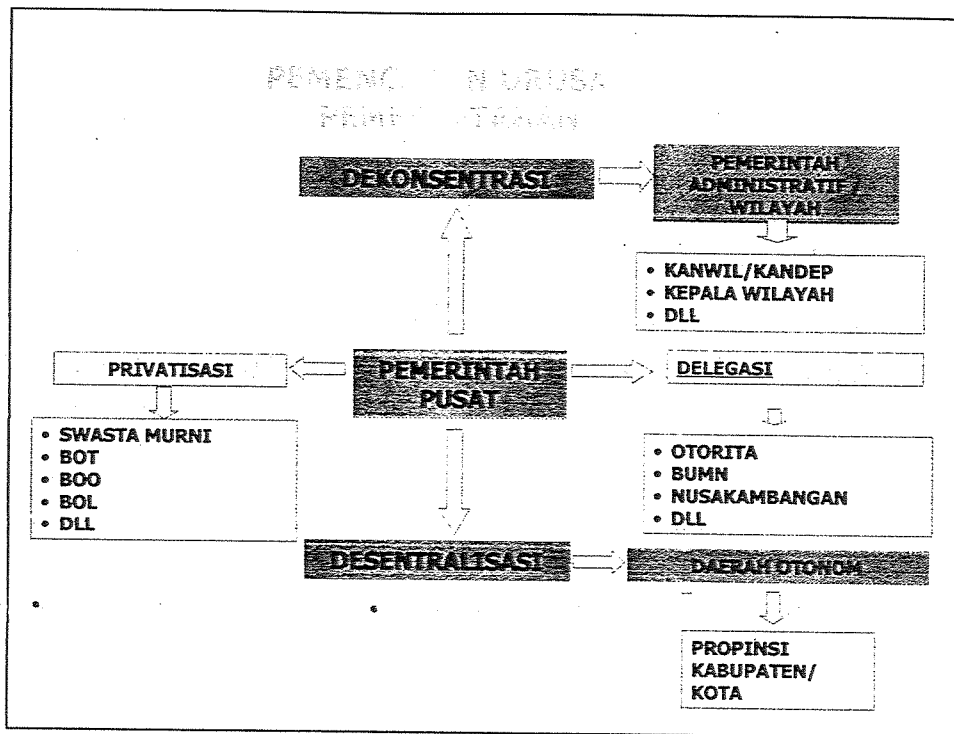
1. UU 22/99 Ps.7 (2) 2%
2. Permenkes No.120/1998 1%
3. Kepres 62/2000 1%
4. PP No.69/2001 1%
5. UU No.25/1999 1%
6. PP 62/1998 1%
7. UU No.21/2001 1%
8. UU No.2/1981 1%
9. UU No.43/2001 1%
10. Kepmenperindag No.107/1998 1%
11. Surat Sekjen Diknas No.088907/2001 1%
12. Permenkes 514/1994 1%
13. PP No.70/2001 1%
14. SE Menhub No.27/2001 1%
15. Kepmenperindag 71/MPR/KEP/10/02 1%
16. Kepmenaker. No.01/1997 1%
17. SK.Menhut No.0652/1996 1%
18. SK Menhut No.594/1996 1%
19. PP No.43/1993 1%
20. PP No.42/1993 1%
21. Kepres No.41/1996 1%
22. Kepres No.64/200 1%
23. PP No.25/2000 3 (4) 1%
24. UU No.8/1999 1%
25. UU No.22/1999 87 (1) 1%
26. UU.No.22/1999 9 (2) 1%

I. TATARAN FILOSOFIS

1. Kenapa Perlu Ada Pemerintah ?
 - a. Untuk menciptakan "Law and Order"
(ketentraman dan ketertiban)
 - b. Untuk menciptakan "welfare"
(Kesejahteraan)
2. Kenapa Perlu Ada Pemerintah Daerah ?
 - a. Wilayah negara terlalu luas
 - b. Menciptakan kesejahteraan secara demokratis

BAGAIMANA MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN OLEH PEMERINTAH





II. TATARAN NORMATIF (UUD NEGARA RI 1945)

1. Alinea IV Pembukaan UUD Negara RI 1945

"Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.... dst

Kesimpulan : Pemerintah RI dibentuk untuk melindungi (Law and Order) dan mensejahterakan rakyat (Welfare)

2. Pasal 18 UUD Negara RI

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
- (4) Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya.

III. URGENSI KEBERADAAN PEMERINTAH DAERAH

1. Keberadaan Pemda untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat secara demokratis
2. Kesejahteraan diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index), dengan indikator utamanya (i) penghasilan; (ii) kesehatan; dan (iii) pendidikan.
3. Untuk meningkatkan pencapaian HDI dilakukan melalui pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
4. Kebutuhan masyarakat terdiri dari : (i) Kebutuhan Pokok (Basic Needs); dan Kebutuhan Pengembangan Sektor Unggulan (Core Competences). Sektor unggulan dapat diidentifikasi dari sintesis PDRB, mata pencaharian, dan pemanfaatan lahan.

2. Pasal 18A UUD Negara RI

- (1) Hubungan wewenang antara Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Kesimpulan :

1. *Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota berkewajiban dan mempunyai kewenangan untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban serta kesejahteraan masyarakat*
2. *Dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban serta kesejahteraan masyarakat wajib bersinergi.*

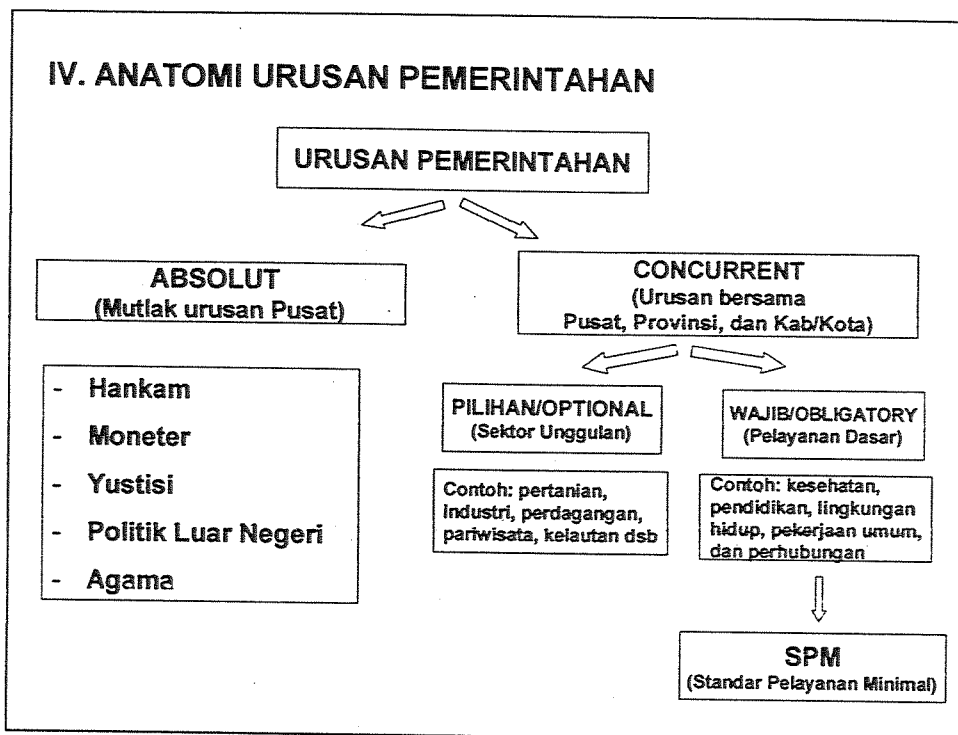
5. Misi utama Pemda adalah :

Menyediakan pelayanan dasar (Basic Services) dan mengembangkan sektor unggulan (Core Competences) dengan cara-cara yang demokratis

6. Outputs / end products Pemda adalah :

- a. Public Goods; barang-barang kebutuhan masyarakat, seperti : jalan, pasar, sekolah, RS, dsb.
- b. Public Regulations; pengaturan-pengaturan masyarakat, seperti KTP, KK, IMB, HO, Akte Kelahiran, dsb.

Kesimpulan : Pemda harus mempunyai kewenangan-kewenangan yang memungkinkan mereka dapat menghasilkan public goods dan public regulations yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (kebutuhan dasar dan pengembangan sektor unggulan)



URUSAN PEMERINTAHAN

Dalam amandemen UUD 1945 Pasal 17 dan Pasal 18, istilah baku yang dipakai adalah “urusan pemerintahan” bukan “kewenangan”

V. DISTRIBUSI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN ANTAR TINGKAT PEMERINTAHAN

Kriteria Distribusi Urusan Pmerintahan Antar Tingkat Pemerintahan :

1. Externalitas (Spill-over)

Siapa kena dampak, mereka yang berwenang mengurus

2. Akuntabilitas

Yang berwenang mengurus adalah tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan dampak tersebut (sesuai prinsip demokrasi)

3. Efisiensi

- Otonomi Daerah harus mampu menciptakan pelayanan publik yang efisien dan mencegah High Cost Economy
- Efisiensi dicapai melalui skala ekonomis (economic of scale) pelayanan publik
- Skala ekonomis dapat dicapai melalui cakupan pelayanan (catchment area) yang optimal

VI. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN YANG DILAKSANAKAN OLEH MASING-MASING TINGKATAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN 3 KRITERIA

1. **Pusat:** Berwenang membuat norma-norma, standar, prosedur, Monev, supervisi, fasilitasi dan urusan-urusan pemerintahan bidang kehutanan dengan eksternalitas nasional.
2. **Provinsi:** Berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan bidang kehutanan dengan eksternalitas regional (lintas Kab/Kota) dalam Norma, Standard, Prosedur yang ditetapkan Pusat
3. **Kab/Kota:** Berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan bidang kehutanan dengan eksternalitas lokal (dalam satu Kab/Kota) dalam Norma, Standard dan Prosedur yang Ditetapkan Pusat

VII. Hubungan Antar Tingkatan Pemerintahan

1. Adanya interkoneksi dan interdependensi antar tingkatan Pemerintahan dalam mengatur dan mengurus urusannya.

Contoh 1:

Urusan Pendidikan Dasar & SLTP →
Kab/Kota

Urusan Pendidikan Menengah oleh Provinsi
Urusan PT oleh Pemerintah Pusat

}
Ada hubungan
interelasi dan
interdependensi

Contoh 2:

Jalan Kab/Kota oleh
Pemkab/Kota

Jalan Prov oleh Pemprov
Jalan negara oleh Pem. Pusat

}
Ada hubungan
interelasi dan
interdependensi

VIII. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

1. INVENTARISASI HUTAN
2. PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN
3. PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN
4. PENATAAN BATAS DAN PEMETAAN KAWASAN HUTAN
5. PENETAPAN KAWASAN HUTAN
6. KAWASAN HUTAN DGN TUJUAN KHUSUS
7. PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN
8. PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN
9. RENCANA KEHUTANAN
10. SISTEM INFORMASI KEHUTANAN
11. RENCANA PENGELOLAAN TAHUNAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI
12. RENCANA PENGELOLAAN LIMA TAHUNAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI
13. RENCANA PENGELOLAAN USAHA UNIT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

14. PENATAAN AREAL KERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI
15. RENCANA PENGELOLAAN TAHUNAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN LIDUNG
16. RENCANA PENGELOLAAN LIMA TAHUNAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG
17. RENCANA KERJA USAHA UNIT PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG
18. PENATAAN HUTAN LINDUNG
19. RENCANA PENGELOLAAN JANGKA PENDEK, MENENGAH DAN PANJANG CAGAR ALAM, SUAKA MARGASATWA, TAMAN NASIONAL, TAMAN WISATA ALAM, TAMAN HUTAN RAYA, DAN TAMAN BURU
20. PEMANFAATAN DAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN PADA HUTAN PRODUKSI
21. PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN DAN JASA LINGKUNGAN PADA HUTAN PRODUKSI
22. INDUSTRI PENGELOLAAN HASIL HUTAN
23. PEREDARAN HASIL HUTAN
24. PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN PADA HUTAN LINDUNG

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

25. PERENCANAAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TERMASUK HUTAN MANGROVE
26. RENCANA PENGELOLAAN DAS
27. REKLAMASI HUTAN
28. PEHUTANAN SOSIAL (SOCIAL FORESTRY)
29. PENGEMBANGAN HUTAN RAKYAT (HUTAN HAK)
30. HUTAN KOTA
31. PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
32. PENGUSAHAAN PARAWISATA ALAM. TAMAN BURU
33. PENGAWETAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR
34. LEMBAGA KONSERVASI
35. PERLINDUNGAN HUTAN
36. PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS
37. LITBANG KEHUTANAN
38. DIKLAT KEHUTANAN
39. PENYULUHAN, PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN HUTAN

TERIMA KASIH





YAYASAN ADISANGGORO

Lembaga Pendidikan, Penelitian dan Manajemen

PEMBANGKITAN SEKTOR KEHUTANAN MENUJU PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

Oleh

NGADIONO

Alumni Fakultas Kehutanan IPB, E4.054

(Disampaikan pada Acara PIKNAS III Tahun 2005, Fakultas Kehutanan
Institut Pertanian Bogor, tanggal 6 September 2005)

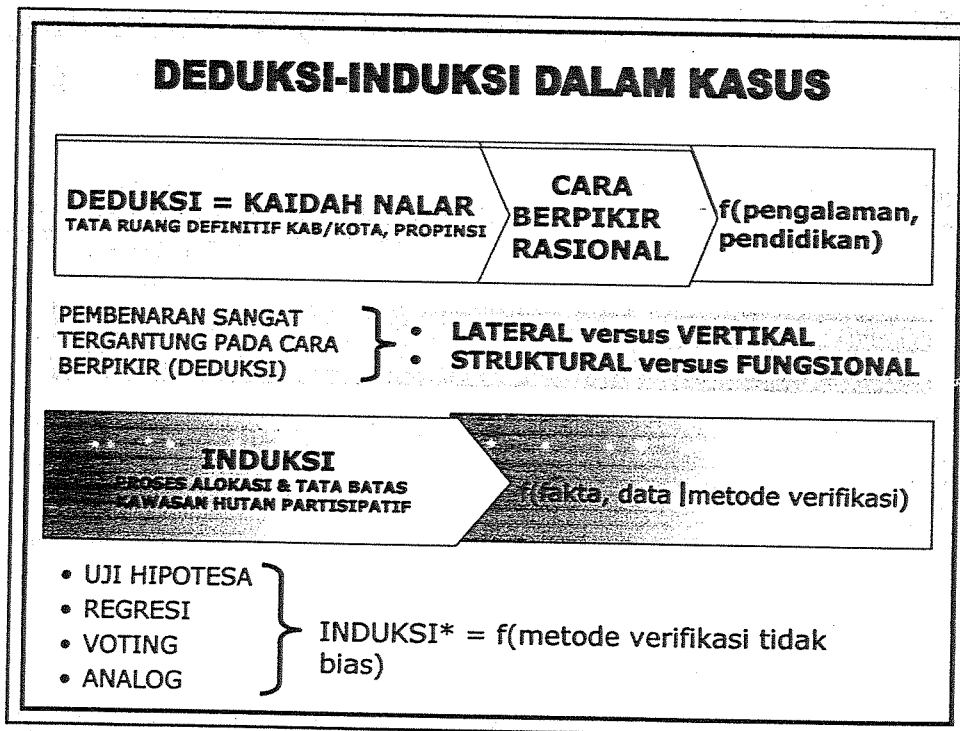
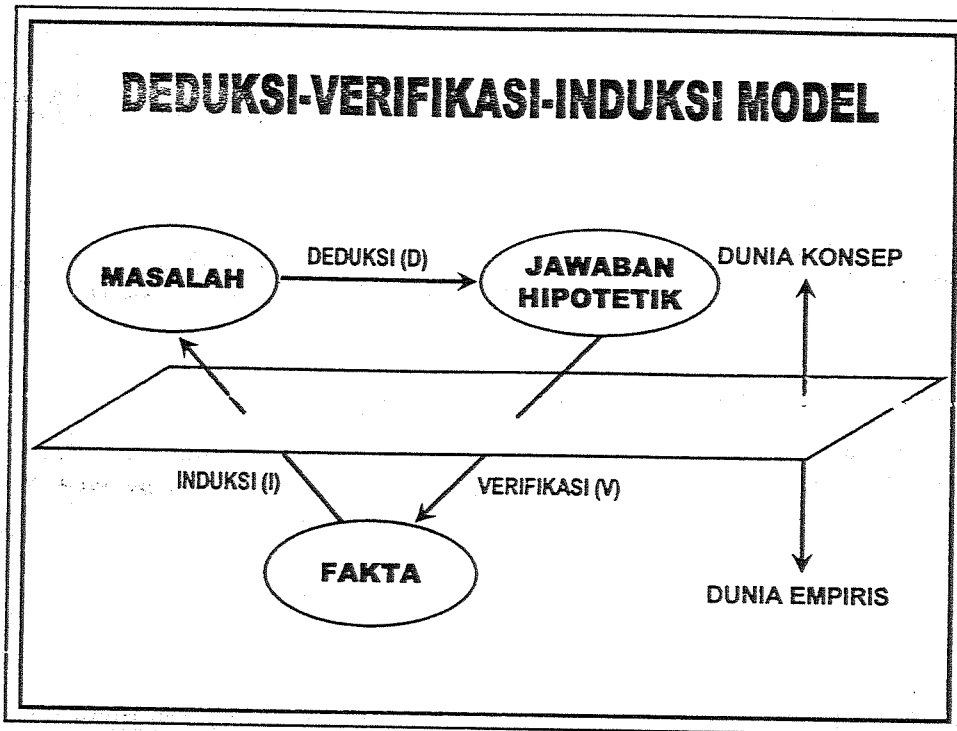
Jl. Sengked, Kampus IPB-Dramaga Bogor 16680, Telp (0251) 621133 (hunting), Fax (0251) 621137
Website : <http://www.adisanggoro.or.id> Email: adisanggoro@adisanggoro.or.id

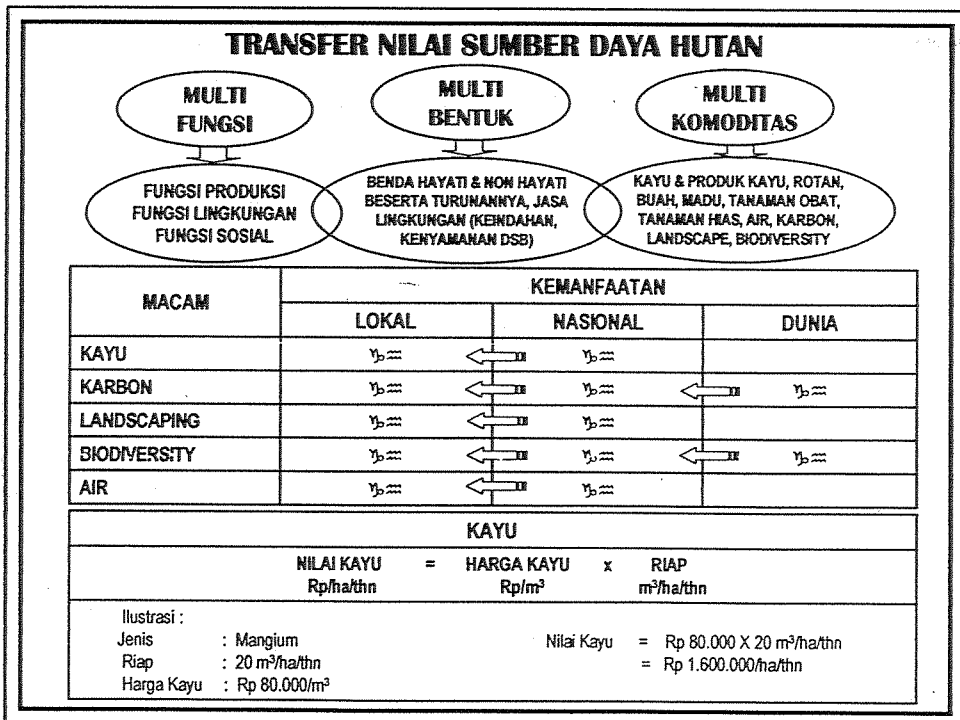
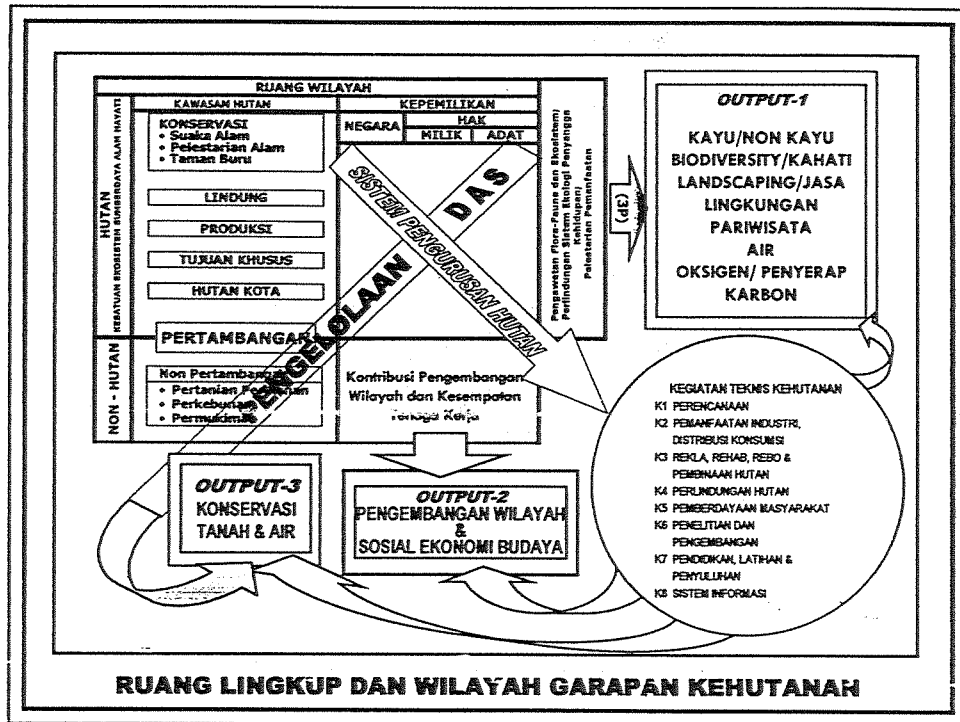
KRITERIA & Kaidah Pembeneran

SISTEM : 4 K { KETERATURAN (K4), KETERGANTUNGAN (K3),
KETERKAITAN (K2), KOMPONEN (K1) }

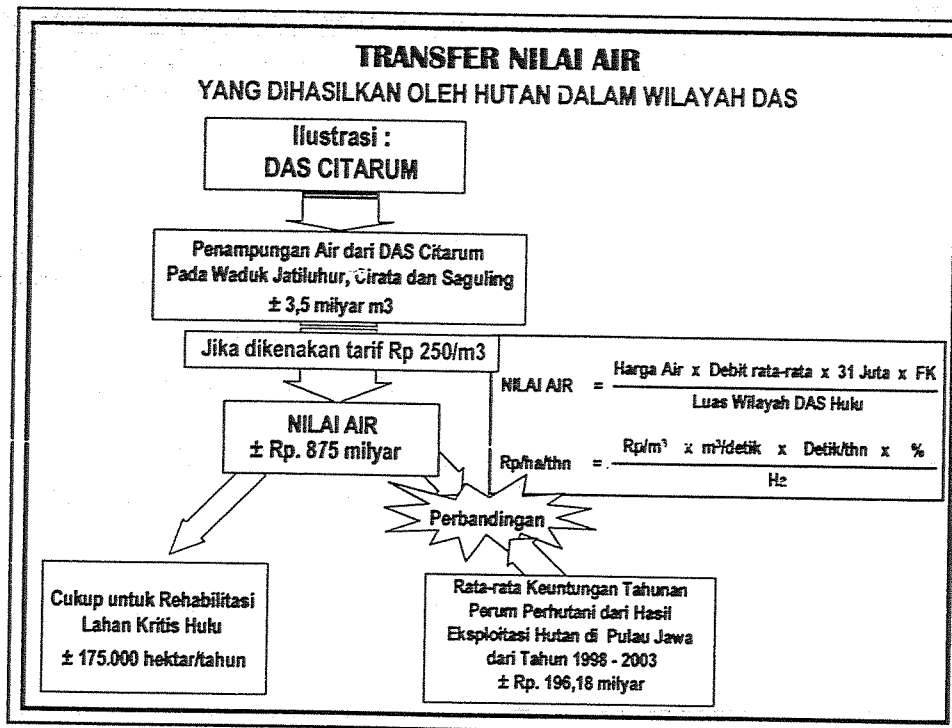
SISTEM	SIFAT	
	TERBUKA	TERTUTUP
ALAM	★	★
BUATAN	★	★ ★

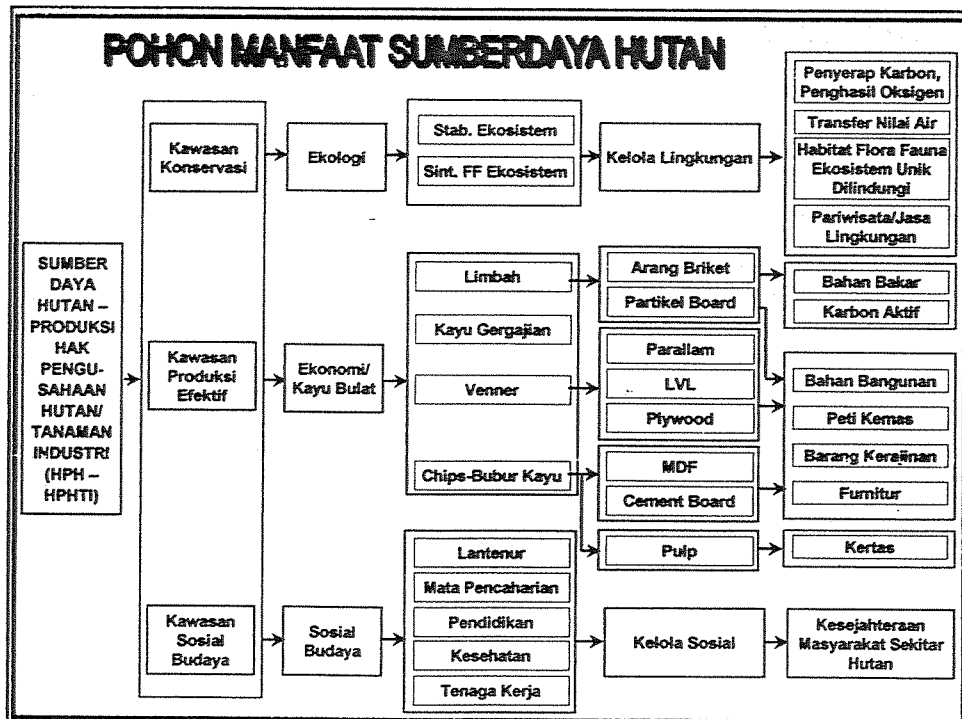
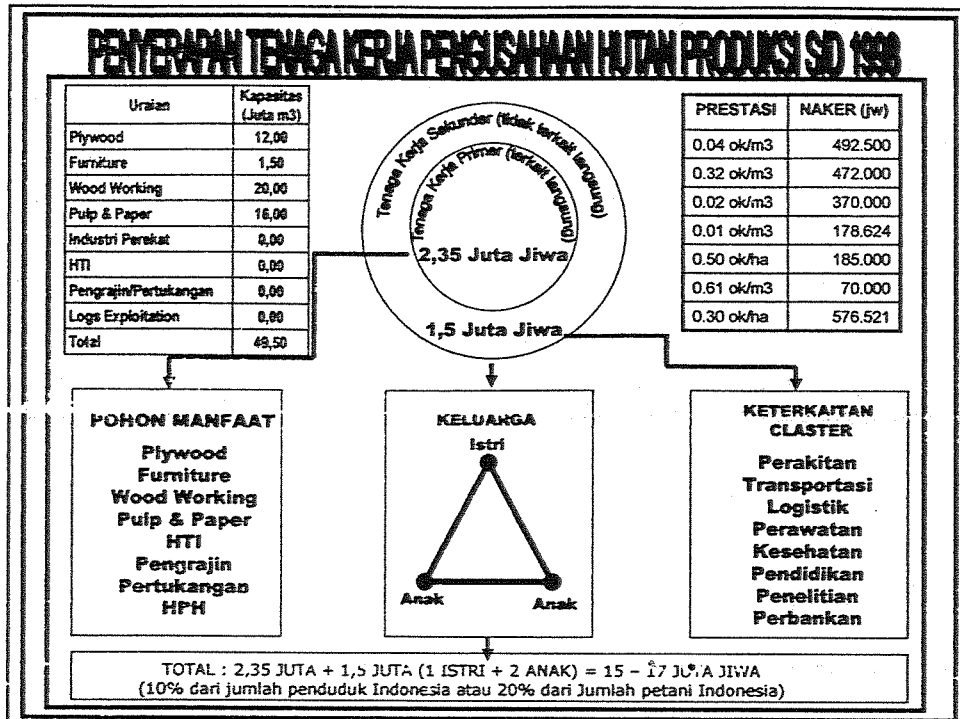
- FAKTA TIDAK SELALU SAMA DENGAN KEBENARAN
- KEBENARAN = f (alat pembeneran, tingkat ketelitian pembeneran)
- PEMBENERAN = f (Mekanisme & Prosedur Rasional)
- RASIONAL/NALAR = Kebenaran normatif yang dapat ditelusuri kriteria/kaidah proses pembenerannya
- KEBENARAN DILIHAT DARI CARA BERPIKIR : (1) Struktural, (2) Fungsional, (3) Optimal dan (4) Acak-acakan; (1) Lateral dan (2) Vertikal; Analog



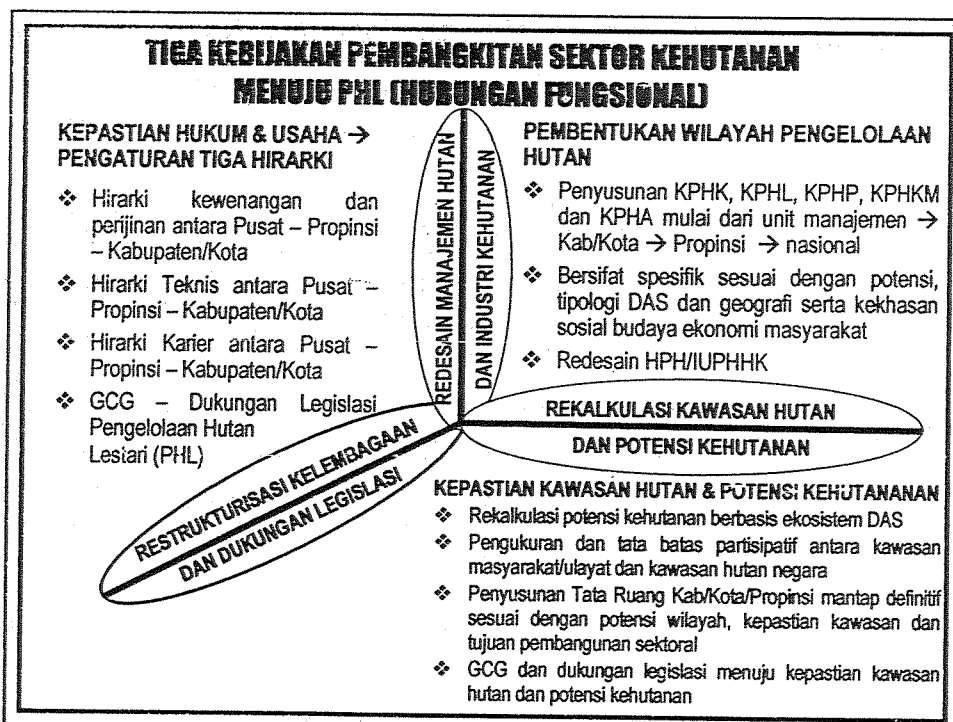


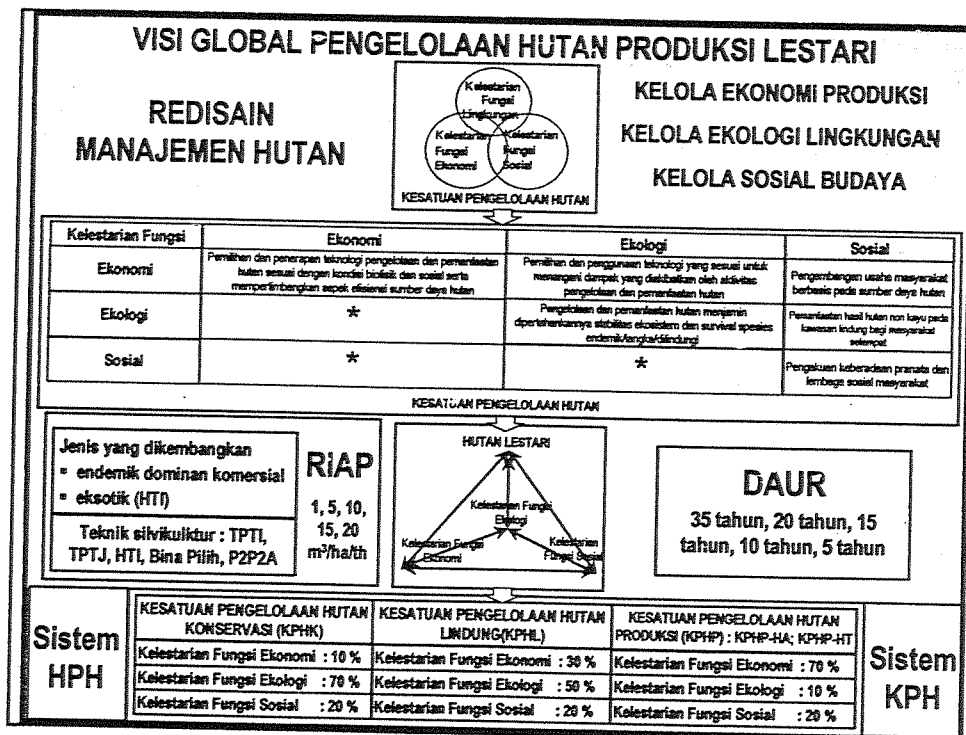
KARBON				
$NILAI CO_2$ Rp/ha/thn	=	$HARGA CO_2$ Rp/ton	$\times 1,67 \times RIAP$ $m^2/ha/thn$	$\times BERAT JENIS$ ton/m ³
Ilustrasi :				
Jenis : Mangium			Nilai CO ₂ =	US\$ 5 x 1,67 x 20 m ³ /ha/thn x 0,61 ton/m ³
Riap : 20 m ² /ha/thn				= US \$ 100,2/ha/thn
Berat Jenis : 0,61				
Harga Kayu : US\$ 5/ton				
LANDSCAPING				
$NILAI LANDSCAPING$ Rp/thn	=	$HARGA SEWA$ Rp/ha/thn	\times	$LUAS WILAYAH$ Ha
BIODIVERSITY				
$NILAI BIODIVERSITY = \Sigma NILAI JENIS$ Rp/thn sampai tak ternilai				
$NILAI JENIS = HARGA JENIS \times JUMLAH JENIS$				
AIR				
$NILAI AIR$ Rp/ha/thn	=	$\frac{HARGA AIR \times DEBIT RATA-RATA \times 31 JUTA \times FK}{LUAS WILAYAH DAS HULU}$		
		$\frac{Rp/m^3 \times m^3/detik \times detik/thn \times \%}{Ha}$		





PERGESERAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN						
ERA	EKSPLORASI → PENGUSAHAAN		PENGELOLAAN			
	Pra HPH → Log & Devisa		Industri Perkayuan		Ekolabel	
PERATURAN PERINDAAN	UU No. 1/1967 1968 UU No. 5/1967 UU No. 6/1968	1980 UU No. 4/1982 SKB TM Tahun 1980 KEPENGHUT No. 196/Kpts/1984	UU No. 5/1990 1990 KEPKES No. 32/Thn 1990	UU No. 24/1992 1990 UU No. 5/1994 UU No. 23/1997 PP No. 7/1990	UU No. 22/1999 UU No. 25/1999 UU No. 4/1999 PP No. 6/1999	2000 2004 PP 25/2000 PP 34/2002 PP 35/2002 SK MENHUT 65/12000
PERUBAHAN RUTAN	MODAL PEMBANGUNAN NASIONAL		FAKTOR PRODUKSI LOGS MEMPHAYAI NILAI TAMBAH		SUMBER DAYA ALAMI EKOSISTEM DAN RUANG	
HA LAJENEN KAWASAN	HUTAN BELAKTARA HPH DAN HPHH ATAS PERMOHONAN DAN KONSESI - PETA ELITA, CEPANJANG SUKOHAI 70 anak HPH - 13 juta ha		DEKRAH DATA SEKUNDER TATA GUNA HUTAN KEPRAKTIKAN - TEKNIK KSA 18 j, HL 30 j, HPT 31 j, HP 34 j, HPK 30 j ha 143 juta ha : 74 % HPH - KULTIVASI LOGGING - SUKOHAI MARGO 622 anak HPH - 58,9 juta ha		PADUSERASI TGKH DAN RTKWP KSA 18 j, HL 30 j, HPT 17 j, HP 29 j, HPK 14 j ha 499.440 ha : 55 % 396 anak HPH - 46,3 juta ha	
MAJAL. MAJAL. MAJAL. MAJAL. MAJAL.	PRODUKSI - LOGS TPI - Seragam menurut Prov & Eko Rata-rata 17,7 juta m3 per tahun		EKONOMI PRODUKSI - EKOLOGIS LINGK. Misi ekologis & dim. ekonomi yg berbeda TPTI - Seragam menurut Prov & Eko Rata-rata 27,0 juta m3 per tahun		EKON PROD - EKO LINGK - SOSBUD * Misi ekologis & dim. ekonomi yg berbeda TPTI, TPTJ dan HTI Rata-rata 24,8 juta m3 per tahun	
MAJAL. RE. MAJAL. RE. MAJAL. RE. MAJAL. RE. MAJAL. RE. MAJAL. RE.	SENTRALISTIK - DIMAS KEH. PROV. LHM HPH, HPHH OLEH MENTAN TERKON OLEH DIRJEN KEHUTANAN HPH - HUTAN PRODUKSI SK MENTAN No. 29/1/1970		SENTRALISTIK - KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN LHM HPH, HPHH OLEH MENTERI KEHUTANAN TERKON DITJEN BINA PRODUKSI KEHUTANAN DITJEN PENGUSAHAAN HUTAN KEPMENHUT No. 195/1984 : HPH - INDUSTRI → KPHP		DEKRAH KEH. PRON. KAB. LHM & PERB. TURPANG TINDH PUSAT, PROV. KAB. PP 889/2002 PP 23/76 dan PP 7/90	
MAJAL. MAJAL. MAJAL. MAJAL. MAJAL.	TIDAK TERKAIT DENGAN HPH EKSPOR LOGS RATA-RATA 79 %		TERKAIT DENGAN HPH PENGHENTIAN EKSPOR LOGS SKB TM 1960 DAN SKB 4 DJ 1961 1983/84 kapasitas bb: 37,9 juta m3 per thn		TIDAK TERKAIT HPH PROFIT CENTER TDK EKSPOR LOGS	
MAJAL. MAJAL. MAJAL. MAJAL. MAJAL.	PEMANFAATAN TERBATAS PADA JENIS-JENIS YANG SUDAH DIKEMAL. MERANTI - TERAPIUNG		KELANGSINGAN PRODUKSI KAYU, PERBAIKAN TEKNIK SILVIKULTUR, PEMERIKHAAN PRODUKTIVITAS HUTAN MELALUI HTI (SEMENAR), UJI COBA TTJ		KAWASAN UNIT HPH TERTATA MENURUT FUNGSI NYA (PROD, EKO & SOSBUD) SEMUA KAWASAN HUTAN KEMPUNYAI FUNGSI PROD - EKO - SOSBUD DALAM PAYUNG KONSEP HUTAN LESTARI	
MAJAL. MAJAL. MAJAL. MAJAL. MAJAL.	TIDAK TERKAIT HPH PENGHENTIAN EKSPOR LOGS SOFT LANDING 6,9 juta m3/tn (2002) - 5,7 juta m3/tn (2004)		TIDAK TERKAIT HPH PENGHENTIAN EKSPOR LOGS SOFT LANDING 6,9 juta m3/tn (2002) - 5,7 juta m3/tn (2004)		TIDAK TERKAIT HPH PENGHENTIAN EKSPOR LOGS SOFT LANDING 6,9 juta m3/tn (2002) - 5,7 juta m3/tn (2004)	
MAJAL. MAJAL. MAJAL. MAJAL. MAJAL.	RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN DAN DUKUNGAN LEGISLASI		REDESAIN MANAJEMEN HUTAN DAN INDUSTRI KEHUTANAN		REKALKULASI KAWASAN HUTAN DAN POTENSI KEHUTANAN	
MAJAL. MAJAL. MAJAL. MAJAL. MAJAL.	KEMERDEKAAN TERBATAS PADA JENIS-JENIS YANG SUDAH DIKEMAL. MERANTI - TERAPIUNG		KEMERDEKAAN TERBATAS PADA JENIS-JENIS YANG SUDAH DIKEMAL. MERANTI - TERAPIUNG		KEMERDEKAAN TERBATAS PADA JENIS-JENIS YANG SUDAH DIKEMAL. MERANTI - TERAPIUNG	





**LIMA KEBIJAKAN DAN ENAM PROGRAM PRIORITAS
SEKTOR KEHUTANAN TAHUN 2005 – 2009
(Keputusan Menhut No. 456/Menhut-VII/2004)**

LIMA KEBIJAKAN SEKTOR KEHUTANAN TAHUN 2005 – 2009

1. Pemberantasan pencurian kayu di hutan negara dan perdagangan kayu illegal
2. Revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan
3. Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan
4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan
5. Pemantapan kawasan hutan

ENAM PROGRAM SEKTOR KEHUTANAN TAHUN 2005 – 2009

1. Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri
2. Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan
3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Alam
4. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam
5. Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
6. Program Peningkatan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Terima Kasih

Bogor, September 2005

INTERNATIONAL FORESTRY POLICY DIALOGUE AND SIMULATION

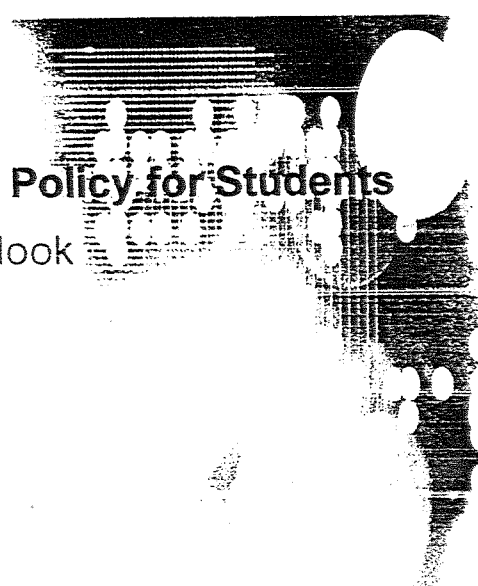


IFSA

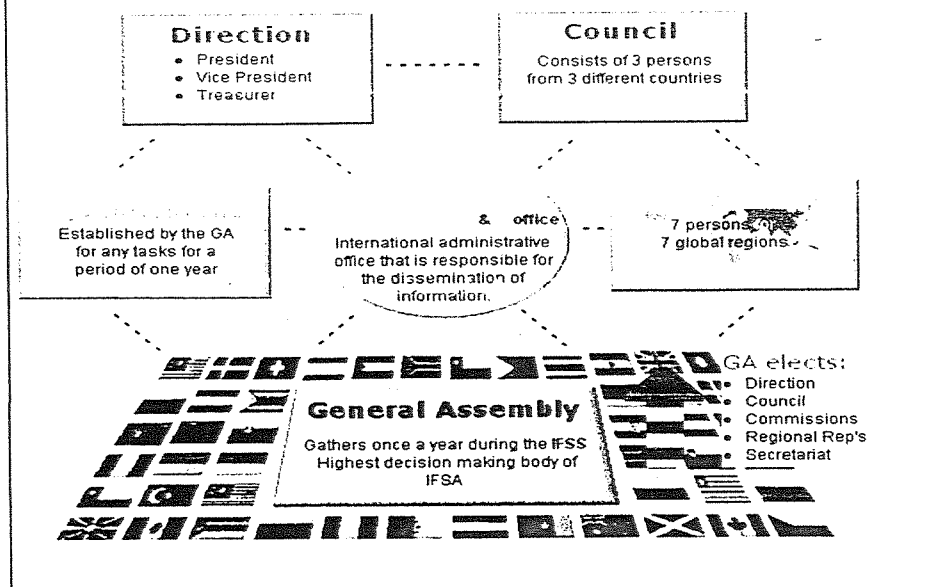


International Forest Policy for Students

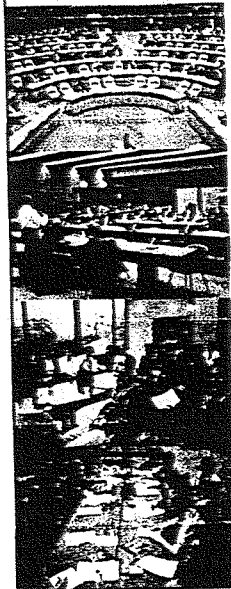
experiences and outlook



Background: How IFSA works?



FOREST POLICY




Why international forest policy?

- **Economical frame: Globalization:**
 - Increasing communication
 - Increasing trade
 - Change of power: Governments < > Global players

- **Deforestation in poor countries**
Annual loss of forest cover: 2-3%
 - 20% increase of CO²
 - 10% loss of agricultural GDP because of land degradation and erosion.
 - Loss of Biodiversity
 - Poverty increases




Protection and management policies for forests on global level are necessary



Why international forest policy?

4 reasons for learning about international forest policy

- Problems of forest management are more and more linked with general problems of
- As the future management of forests is more and more influenced by international legislation we have to participate to the decisions
- International meetings are a good place to meet interesting people and to get
- International meetings help to that are difficult to get through in your country without support




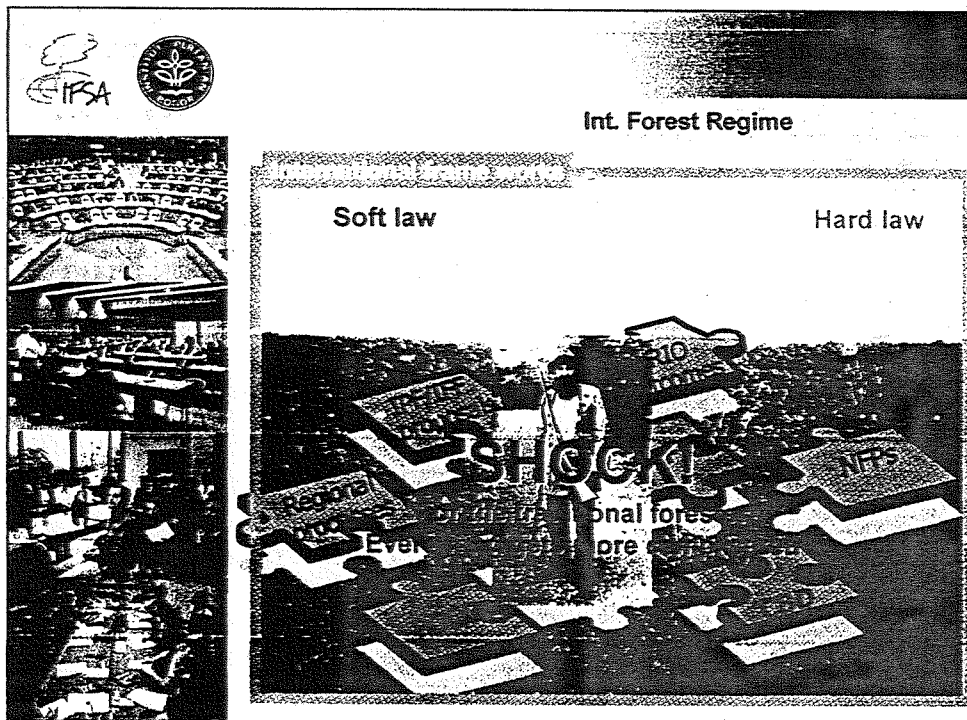
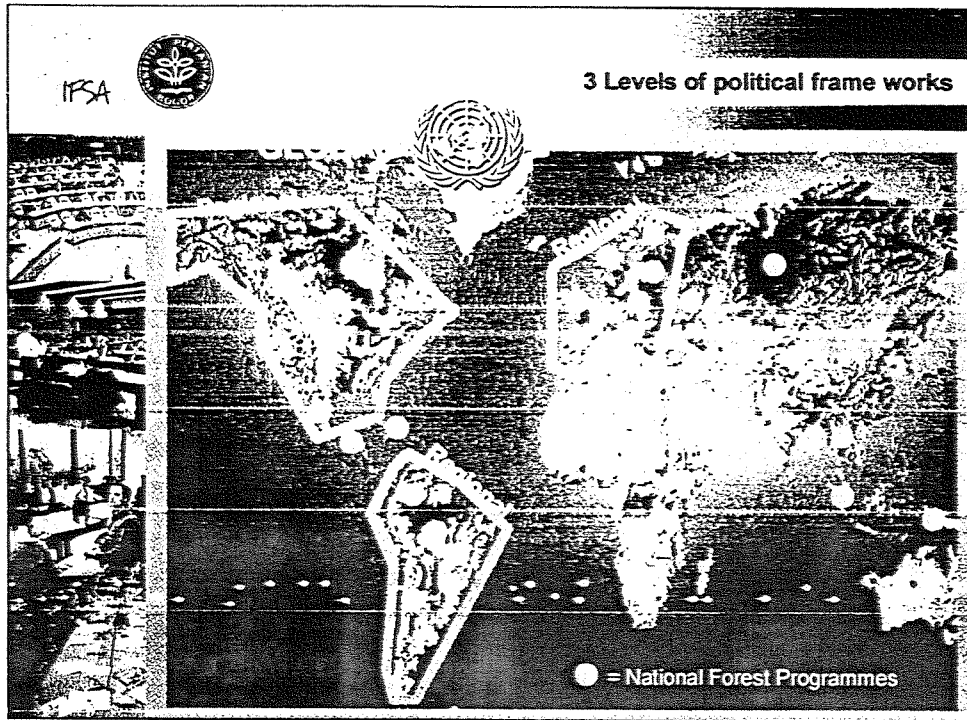
Int. Forest Regime



International Forest Regime

<p>UN processes [indirect]</p> <p>Climate Biodiversity Desertification</p>	<p>UN processes [direct]</p> <p>UNFF > 2005 IPF/ IFF > 2000 RIO 1992 Agenda 21 Forest Principles</p>	<p>Regional processes</p> <p>MCPFE („Helsinki“) „Montreal-Process“ FLEGT</p>
---	---	---

Governments









Higher Education?

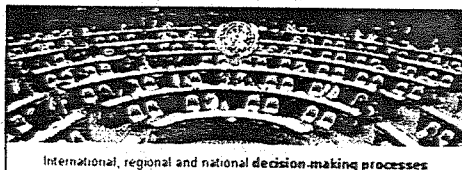
So, have you ever heard about all these political frameworks on forests?

We found out that most of the forestry students never did!


Can students help to improve the situation?



The education project




International, regional and national decision-making processes



Homepage

Facilitation of the information flow

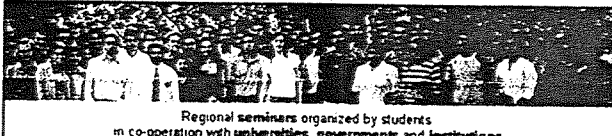


Youth delegates participate in decision-making

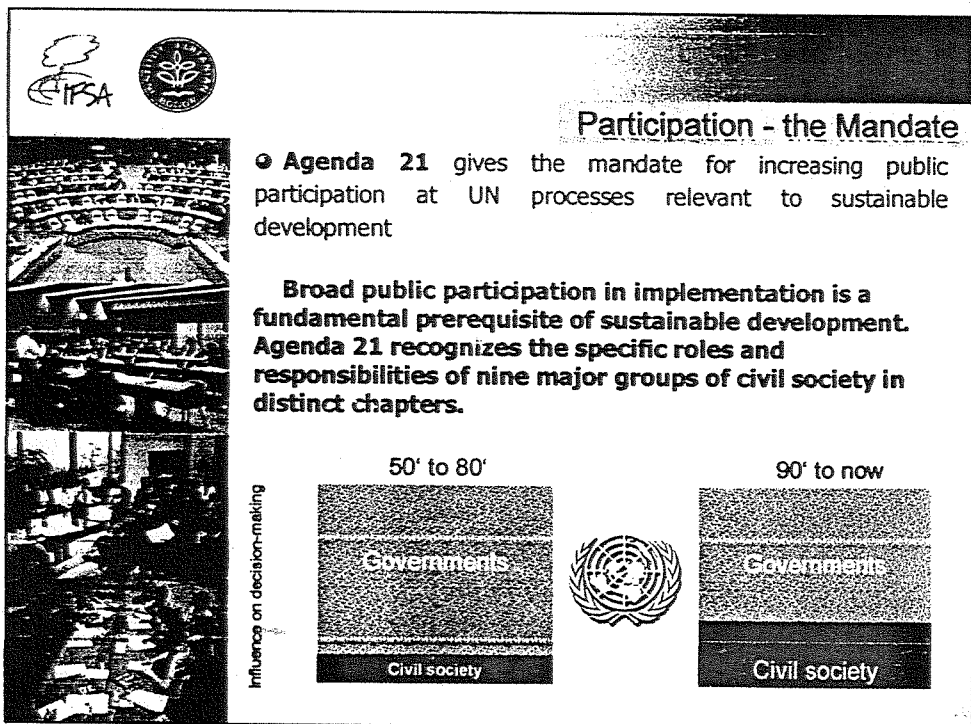
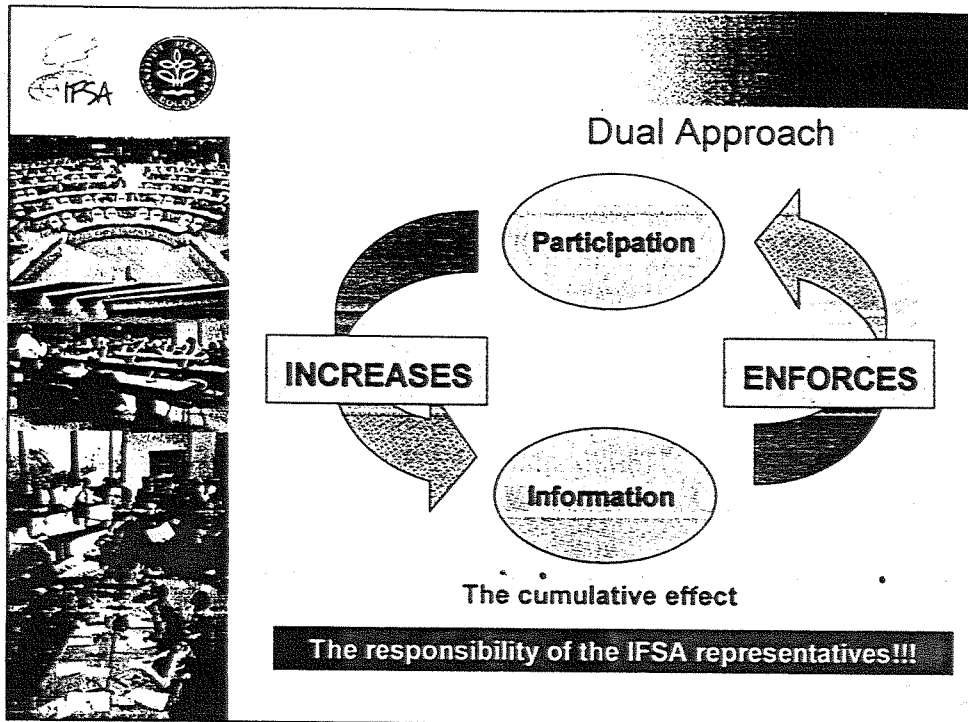
Youth delegates report their knowledge to students. Evaluation of the youth representation


Youth delegates are elected and information on the outcomes of the seminars is reported to the representatives

Youth representation in international, regional and national decision-making processes



Regional seminars organized by students in co-operation with universities, governments and institutions








Example UNFF

"The United Nations Forum on Forests (UNFF), is open to all States and should operate in a transparent and participatory manner. Participation of a wide range of forest-related stakeholders is a key component of sustainable management of forests. Thus, the Forum welcomes the participation of the nine major groups as identified in Chapter 23 of Agenda 21, including":

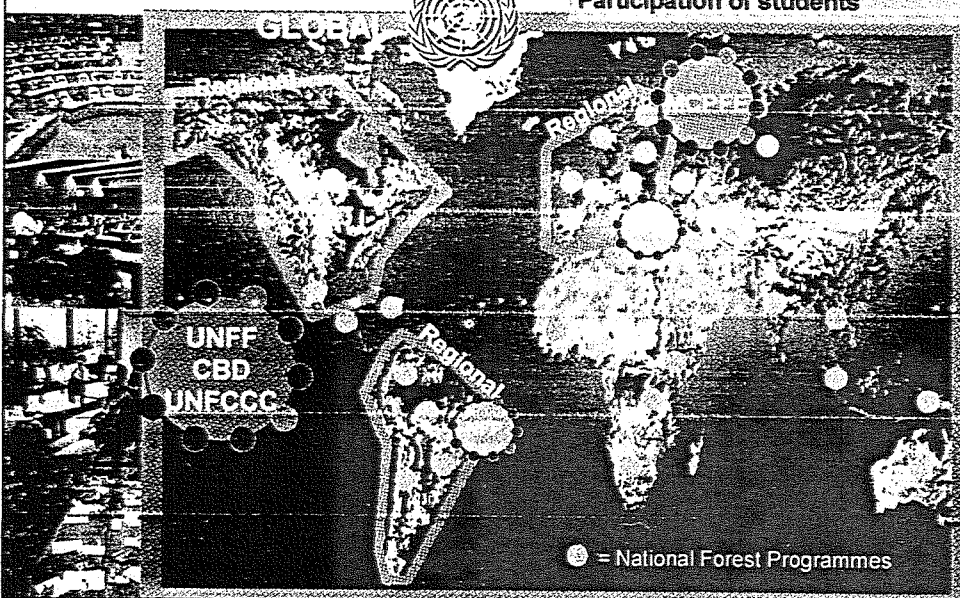
- > Business and Industry
- > Workers and Trade Unions
- > Farmers and Small Forest Landowners
- > Environmental NGOs
- > Indigenous People
- > Women
- > Scientific and Technological Community

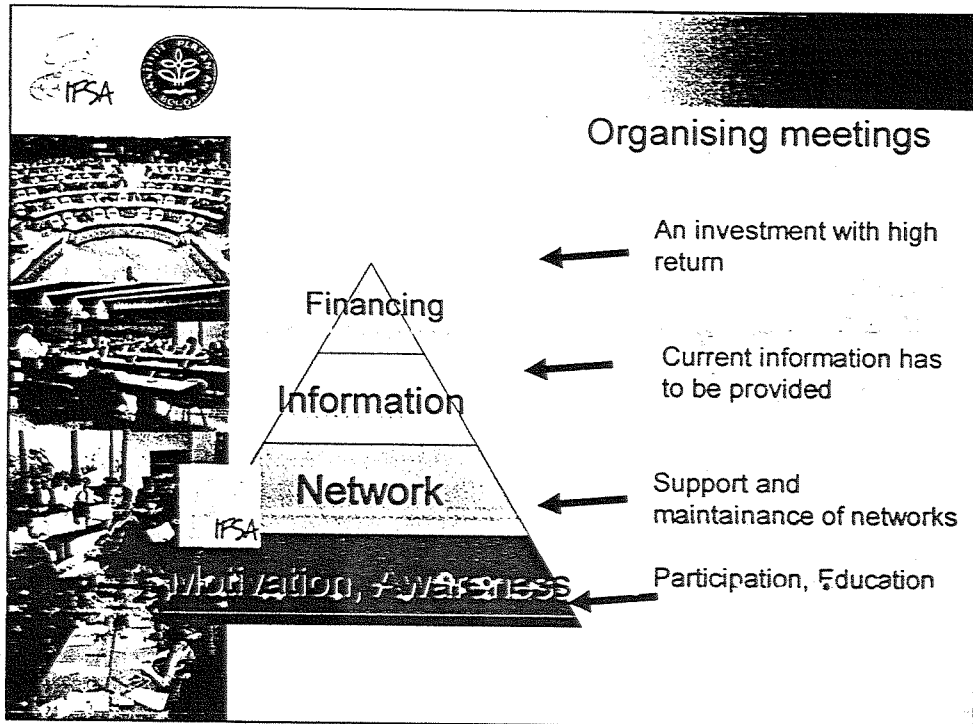
Government's Participation
Civil society
International organisations



Participation of students



GLOBAL
Regional
Regional
UNFF
CBD
UNECCC
Regional
= National Forest Programmes



Experiences Freiburg

June 2003

"International frameworks of forest Politics"


- Forestry students
- 6 representatives of the international forest policy dialogue

Results

- 31 forestry students from 19 countries that are interested in international forest politics could share their views
- They brought their experience back to their universities and colleagues
- New partnerships for education in forest politics (f.e. GTZ) were established
- Network building for our engagement at UNFF, CBD and UNFCCC

Financing

- Private foundation, Uni Freiburg, Students



Experiences Helsinki

Course on international forest politics at the University of Helsinki

March 2004



- Initiated by forestry students
- In cooperation with Helsinki University, INDUFOR, Ministry of Agriculture and Forestry, Ministry of Environment, Ministry of Foreign Affairs

Results

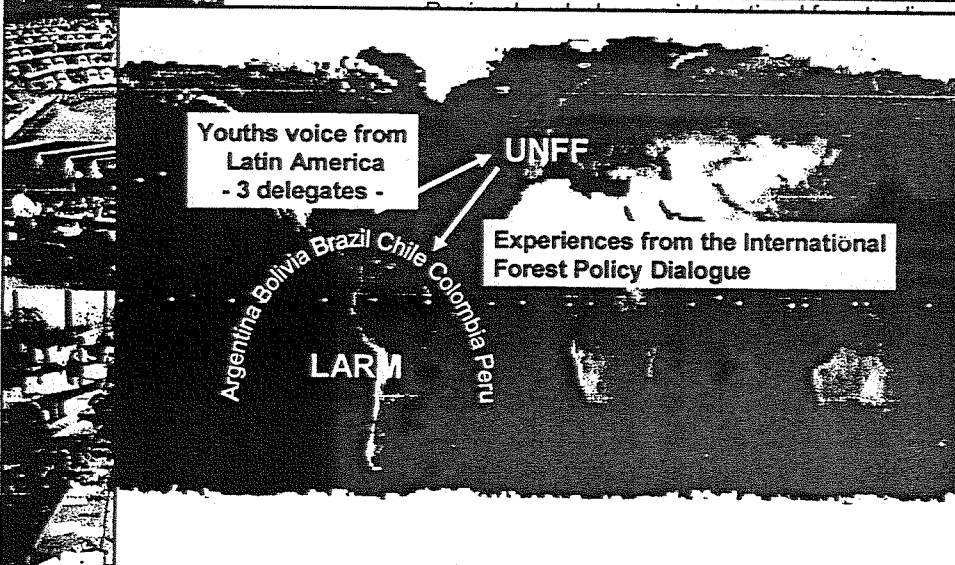
- 60 forestry students were introduced to international forest policy
- A partnership with the university and the different ministries got initiated
- A dialogue between students and different stakeholders of forestry got started

Financing

- University facilities

Experiences Virasoro





Youths voice from Latin America - 3 delegates -

UNFF


Experiences from the International Forest Policy Dialogue

LARM



Argentina Bolivia Brazil Chile Colombia Peru



Experiences Geneva



May 2004



IFSA represents YOUTH at UNFF4



- IFSA is Youth/Children focal point
- 25 students from 19 countries, 5 continents
- Youth representation, Forestry education work shop, side event PRSP

Results


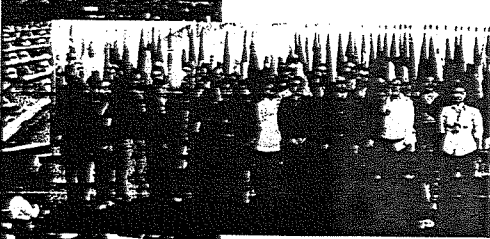
- The importance of higher forestry education was recognized by the parties
- Partnerships were established
- Doors where opened
- Strengthening of the network

Financing

- UNFF-S, GTZ, Universities, Gov, students



Experiences New York



IFSA represents YOUTH in UNFF5

- IFSA is Youth/Children focal point
- 35 students from 20 countries, 5 continents
- Side event IFSA-UNESCO

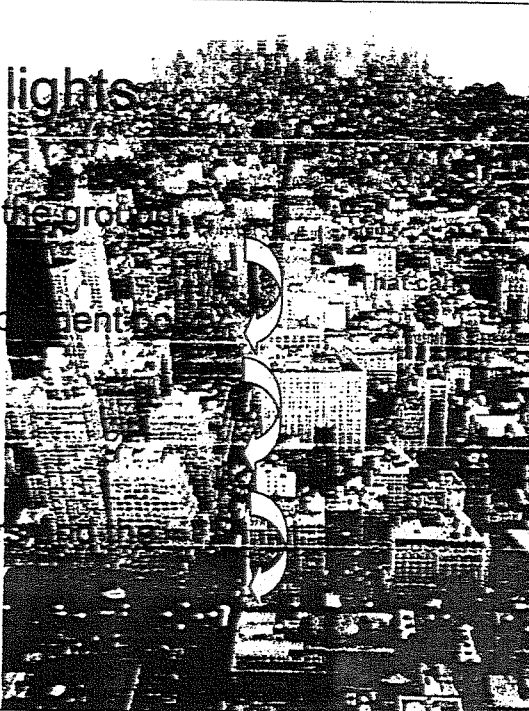
Results

- The awareness on the importance of higher forestry education increased
- Partnerships were established
- Doors were entered
- Strengthening of the network

Financing

- UNFF-S, GTZ, Universities, Gov, students

Reports can be found at
www.forestpolicy.net/unff5



Highlights

Students:

- Have more access to the program
- Help socialize and implement the program
- Learning process
- Future decision makers
- ones to implement it

Implication and Implementation of International Forest Policy Dialogue

Presented
by
Bureau of International Cooperation
Ministry of Forestry

Bogor, 7 September 2005



Scope

- Complex, many instruments and process, various aspects of forest management, around the world
- Varies and numerous issues: SFM, BD, CD & FD, Intl Trade, Econ Growth, CC, etc.
- A full range of perspectives on forest values and benefits are considered (economic, environmental, social, spiritual, recreational)

Scope

- **Bilateral - Multilateral - Regional**
 - Bilateral: technical cooperation and assistance
 - Multilateral: majority are convened through the United Nations
 - Regional: in the early stage
- **Binding - Non binding**
 - Binding: with legal basis and subsequent obligation
 - Non binding: with the weight of international consensus

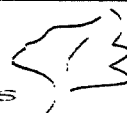
3

FOCUS

- **Multilateral**
 - UNFF (United Nations Forum on Forests)
 - ITTO (International Tropical Timber Organization)
 - FAO (Food and Agriculture Organization)
 - Convention (Ramsar, CITES, UNCBD, UNFCCC, UNCCD)

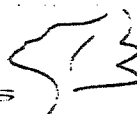
Others (including regional fora such as AFP and FLEG) 4

United Nations
Forum on Forests



- To promote the management, conservation and sustainable development of all types of forests and to strengthen long-term political commitment to this end.
- **Mandate:**
 - facilitate implementation of the IPF/IFF PfA
 - provide a forum for policy dialogue
 - enhance coordination of work of international organizations
 - foster international cooperation
 - monitor & assess progress, enhance political commitment to SFM
- **Collaborative Partnership on Forests (CPF)**
 - support the work of the UNFF
 - 14 members: UNFF, FAO, ITTO, UNCBD, UNFCCC, UNCCD, UNEP, UNDP, WB, GEF, CIFOR, IUCN, IUFRO, ICRAF

United Nations
Forum on Forests



Implikasi:

- **Pelaporan sukarela progres pelaksanaan proposal aksi IPF/IFF berdasarkan 12 thematic issues**
- **Prakarsa Indonesia bersama negara/lembaga internasional**
 - IoD Workshop on Decentralization of forestry sector (Interlaken, Swiss, 2004)
 - Diseminasi hasil ke dalam negeri dan input penyempurnaan UU Pemerintahan Daerah (UU No. 33 tahun 2005)

6

United Nations
Forum on Forests

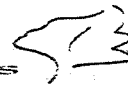


12 thematic issues

1. Combating deforestation and forest degradation
2. Forest conservation and protection of unique types of forest and fragile ecosystems
3. Rehabilitation and conservation strategies for countries with low forest cover
4. Rehabilitation and restoration of degraded lands and promotion of natural and planted forests
5. Economic aspects of forests, including trade
6. Forest health and productivity
7. Maintaining forest cover to meet present and future needs
8. Social and cultural aspects of forests (SCAF)
9. Traditional forest-related knowledge (TFRK)
10. Scientific forest-related knowledge (SFRK)
11. Monitoring, assessment and reporting, concepts, terminology and definitions
12. Criteria and indicators of sustainable forest management (C&I)

7

United Nations
Forum on Forests



UNFF-Implementation

- **Thematic 1: Combating deforestation and forest degradation**
 - **Illegal logging**
 - A joint operation with the National Police & the Indonesian Navy.
 - Bali Ministerial Declaration on Forest Law Enforcement and Governance (FLEG) in September 2001.
 - Establishment of a secretariat and clearing-house of timber export and import data.
 - Reviewing the existing judicial system that is not conducive to the prosecution of illegal logging and trading cases-greements with other countries in the form of bilateral cooperation
 - Several cooperation projects to combat illegal logging

8

United Nations
Forum on Forests



UNFF-Implementation

- **Thematic 1 (continued)**
 - **Forest Fire**
 - 6 forest fire brigades called Manggala Agni in most 5 prone provinces (80% personnel recruited stems from local community and 20% comes from forest ranger)
 - early warning system, fire suppression,
 - training for local community and forestry official
 - zero burning forest clearing have been formulated and implemented
 - - technical cooperation under ASEAN framework

9

United Nations
Forum on Forests



UNFF-Implementation

- **Thematic 1 (continued)**
 - **Critical land**
 - Land and Forest Rehabilitation and its National Movement (GNRHL/Gerhan) (3 million hectares for 5 years until 2007)
 - Seed centers in Yogyakarta, South Kalimantan, West Java and South Sumatra
 - Village seedling area in conjunction with community forestry
 - Community Based Forest Management
 - Industrial Forest Plantation Development
 - Ratifying UNCCD through Presidential Decree No. 135/1998.

10

ITTA

- **International Tropical Timber Agreement, adopted in 1983 and has been extended in 1994.**
- **Stems to the establishment of the International Tropical Timber Organization (ITTO): producing members and consuming members**
- **Commodity agreement focuses on the management of tropical forests**
- **No mandate to cover temperate and boreal forests**
- **ITTA is currently being re-negotiated**

11

ITTA-implementation

- **Guidelines publication**
ITTO develop series of internationally agreed policy documents

E.g:
 - Revised ITTO criteria and indicators for the sustainable management of tropical forests *including reporting format* (2005)
 - ITTO guidelines for the restoration, management and rehabilitation of degraded and secondary tropical forests (Nov 2002)
 - ITTO guidelines on the conservation of biological diversity in tropical production forests (Sep 1993)
- **Workshops and Training**

12

ITTA-implementation

- **Project financing**
 - Since 1990: 38 project in amount of +US\$ 26 million
 - 3 additional recently approved projects in amount of US\$ 1,1 million:
 - 1) Rehabilitation of Degraded Forest Land Involving Local Communities in West Java US\$ 576,366 (Donor US\$ 493,236)
 - 2) Rehabilitation of Degraded Forest Using Indigenous Species through Collaboration with Local Communities in West Kalimantan US\$ 65,766 (Donor US\$ 52,769)
 - 3) Utilization of Small-Diameter Logs from Sustainable Source for Bio-Composite Product US\$ 865,163 (Donor US\$ 600,000)

13

FAO

- Food and Agriculture Organization is one of the largest specialized agencies in the UN system and the lead agency for agriculture, forestry, fisheries and rural development
- Mandate:
 - To raise levels of nutrition, improve agricultural productivity, better the lives of rural populations and contribute to the growth of the world economy
- Act by the default as the world forestry despite the fact that FAO's main priorities are related on its food production mandate
- For decades only dedicated about 4.5% of its budget to forests – down from nearly 10% in the 1950s

14

FAO

- COFO is the premier FAO Forestry Statutory Body. Its biennial sessions identify emerging policy and technical issues, to seek solutions and to advise FAO and others on appropriate action
 - Mandate, among others:
 - Conduct periodic reviews of international forestry problem
 - Review the programmes of the FAO in the field of forestry and their implementation
- Undertaking Ministerial Meeting on Forests and World Forestry Congress

15

FAO-implementation

- **Guidelines publication**
FAO develop series of internationally agreed policy documents
- Example:
- People and Forest: FAO participatory forestry publications
 - Climate change and the forest sector: possible national and subnational legislation (FAO Forestry Paper 144)

- **Workshops and Training**



16

FAO-implementation

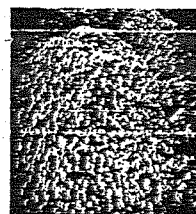
- **National Forest Programmes (NFP)**
 - enhancing national forestry planning process through multi-stakeholder involvement
 - Supported by National Forest Programme Facility FAO
- **Forest Resource Assessment (FRA)**
 - each nation submits data for Global Forest Resource Assessment (GFRA) to be launched by end of 2005
 - source of world forestry information
 - using variables related to the concept of SFM (15 indicators)

17

FAO-implementation

15 Indicators in FRA 2005:

1. Extent of the forest and other wooded land
2. Ownership of the forest and other wooded land
3. Designated function of the forest and other wooded land
4. Characteristics of the forest and other wooded land
5. Growing stock
6. Biomass stock
7. Carbon stock
8. Disturbance affecting health and vitality
9. Diversity of tree species
10. Growing stock composition
11. Wood removal
12. Value of wood removal
13. Non-wood forest product removal
14. Value of non-wood forest product removal
15. Employment in forestry



18

FAO-implementation

- Reporting and discussing national forestry sector under FAO forum, especially at COFO.

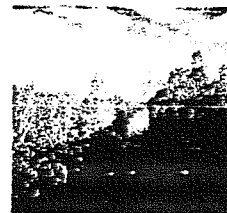
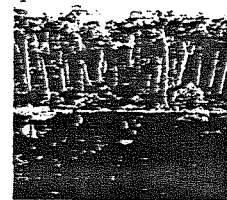
Example from the recent 17th Session COFO, with agenda:

- Needs and opportunities for international cooperation in forest fire preparedness
- The role of forests in contributing to the Millennium Development Goals
- Maintaining the international commitment to sustainable forest management

19

Ramsar

- **Intergovernmental treaty** dibentuk di kota Ramsar, Iran pada tanggal 2 Pebruari 1971, yang kemudian ditetapkan sebagai hari lahan basah sedunia
- Nama lengkap **Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat**
- Pemerintah Indonesia meratifikasi melalui Kepres RI No. 48 tahun 1991
- **Fokus**
 - konservasi hampir 900 lahan basah yang termasuk dalam daftar lahan-lahan basah Ramsar
 - mempromosikan penggunaan yang bijaksana dari sumberdaya hutan lahan basah termasuk airnya

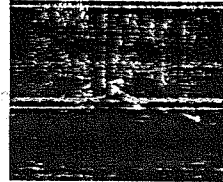


20

Ramsar

- **Definisi lahan basah**

Daerah payau, paya, tanah gambut atau perairan, baik yang bersifat alami maupun buatan, tetap ataupun sementara, dengan perairannya yang tergenang ataupun mengalir, tawar, agak asin ataupun asin, termasuk daerah-daerah perairan laut yang kedalamannya tidak lebih dari enam meter pada waktu air surut



- **Dephut c.q Ditjen PHKA menjadi Ramsar Administrative Authority di Indonesia yang sekaligus national focal point**

21

Ramsar-implementation

- Masuknya dua unit kawasan lahan basah ke dalam Daftar Ramsar Site, yaitu Taman Nasional Berbak (1992) dan Taman Nasional Danau Sentarum (1994)
- Pembentukan Komisi Nasional Pengelolaan Lahan Basah (SK Menhut No. 226/ tgl 9 Mei 1994)
- Ditjen PHKA dan *Wetland International Indonesia* Program menjadi tuan rumah “*South East Asia Ramsar Regional Workshop*” (Cisarua tanggal 29 Maret – 1 April 1994)
- Pembentukan Tim Pelaksana Sekretariat dan Konsultan Teknis (SK Dirjen PHKA No. 104/ tgl 22 Mei 1995)



22

Ramsar-implementation

- SK Dirjen PHKA No. 101/ tgl 11 Oktober 1996 tentang pembentukan **Kelompok Kerja (KK) Komnas Lahan Basah**, terdiri dari:
 - 1) KK Konservasi Ekosistem Lahan Basah
(Ketua: Direktur KKH Dephut)
 - 2) KK Pengelolaan dan Pemanfaatan ELB
(Ketua: Direktur Bina Sumber Daya Hayati, Dj Perikanan DKP)
 - 3) KK Informasi dan pengembangan Partisipasi Masyarakat Pada ELB (Ketua: Direktur Bina Produksi, Dj Perikanan DKP)
 - 4) KK Litbang Pengelolaan ELB
(Ketua: Kepala Pusat Litbang Limnologi LIPI)

Ramsar-implementation

- Menominasikan 3 Unit kawasan lahan basah untuk dicatat dalam Daftar Ramsar Site (*wetland of international importance*), yakni TN Rawa Aopa Watumohae, TN Wasur dan CA P. Rambut
- Program Bantuan Ramsar *Integrated Swamp Development Programme* (ISDP) di Taman Nasional Berbak yang melibatkan juga pemerintah daerah setempat dan stakeholder lainnya
- Bantuan hibah dari *Global Environmental Facility* (GEF) terkait dengan Ramsar di Berbak Sembilang (Jambi) senilai US\$ 731.759.

CITES

- Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, adopted in 1973
- Aims to ensure that international trade in specimens of wild animals and plants does not threaten their survival
- Through controls and regulations on species listed in three appendices.



25

CITES-implementation

- Negara anggota menunjuk Otorita pengelola (*Management Authority*) dan Otorita Ilmiah (*Scientific Authority*)
- PP No. 8 tahun 1999 ditunjuk Dephut sebagai Otorita Pengelola dan LIPI sebagai Otorita Ilmiah
- **Otorita pengelola** CITES menjalankan aturan-aturan konvensi termasuk pengendalian perijinan, berdasarkan rekomendasi yang diberikan otorita ilmiah. Rekomendasi yang diberikan **Otorita Ilmiah** menyatakan bahwa suatu species dapat diperdagangkan sesuai dengan prinsip “*non-detriment finding*”, dan “*precautionary principle*”.

26

CITES-implementation

- UU No. 5/1990 tentang KSDAH dan ekosistemnya
- PP No. 7/1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa
- PP No. 8/1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa
- Kepres No. 43/1978 tentang pengesahan CITES
- Keputusan Menhut No. 104/Kpts-II/2003 tentang penunjukkan Dirjen PHKA sebagai otoritas pengelola (*Management Authority*) CITES di Indonesia
- Surat Kepala Pusat Penelitian Biologi-LIPI (Tahun 2005: No. 3645/IPH.1/KS.02/2004 tgl 8 Desember 2004)
- Keputusan Dirjen PHKA tentang Kuota pengambilan tumbuhan alam dan penangkapan satwa liar (Tahun 2005: No. 129/IV-KKH/2004 tgl 15 Desember 2004).

27

CITES-implementation

- Dua pintu pengendalian lalu lintas peredaran/ perdagangan satwa dan tumbuhan liar langka
- Kontrol pengawasan dengan berkoordinasi dengan beberapa instansi terkait
- Penerbitan buku Pengelolaan Jenis Flora dan Fauna yang diperdagangkan Vol. 1 untuk jenis-jenis Reptilia, untuk mempermudah para petugas lapangan
- Bekerjasama dengan WWF menerbitkan Buku Panduan Satwa Liar yang dilindungi
- Pengajuan proposal ASEAN *Joint Effort to Curb Illegal Trade in Wild Life* dalam rangka pengendalian perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar secara internasional

28

UNCBD

- United Nations Convention on Biodiversity, adopted in 1992
- Calls on countries to conserve BD in a number of areas, including forest ecosystems
- At the 4th Conference of the Parties (COP 4) in 1998, a programme of work (PoW) for forest BD was adopted, calling on countries to integrate BD considerations into their forest management systems and programs
- At COP 6 in April 2002, an expanded programme of work (EPW) for forest BD was adopted. The EPW contains 130 activities.



29

UNCBD

- Merupakan salah satu perjanjian yang mendapat **dukungan dan pengakuan paling luas** secara global. Semenjak itu sudah 183 negara di seluruh dunia meratifikasinya. Indonesia meratifikasi UNCBD melalui UU No 5 tahun 1994
- Merupakan perjanjian internasional pertama yang tidak saja menetapkan kewajiban tetapi juga menyertakan atau **mengakomodir hak-hak suatu negara** atas sumber daya genetik binatang dan tumbuhan yang berada dalam wilayah yuridiksinya
- **National Focal Point** ada di KLH

30

UNCBD

- **Tujuan:**
 - Konservasi keanekaragaman hayati
 - Pemanfaatan secara lestari komponen keanekaragaman hayati
 - Pembagian keuntungan secara adil dan merata atas pemanfaatan sumber daya genetik
- **Keputusan COP CBD yang terkait dengan sektor kehutanan:**
 - Ecosystem approach and sustainable forest management (EPW)*
 - Collaboration with other bodies (EPW dan PoW)*
 - Protected areas (PoW)*
 - Forest law enforcement and related trade (EPW)*
 - Sustainable use/benefit sharing (EPW)*
 - Servicing capacity-building (EPW)*

31

UNCBD-implementation

- Program prioritas Departemen Kehutanan dalam Program Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu (SK Menhut No 456 tahun 2004) yaitu:
 - pemberantasan pencurian kayu di hutan Negara dan perdagangan kayu illegal
 - revitalisasi sektor kehutanan, khususnya industri
 - rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan
 - pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan
 - pemantapan kawasan hutan

32

UNCBD-implementation

- **Upaya dalam pemberantasan illegal logging:**
 - Kerjasama bilateral/regional/multilateral
 - + MoU with UK and Northern Ireland on Illegal Timber Trade
 - + Cooperation with EU on FLEGT
 - + MoU with RRC on Illegal Timber Trade
 - + Cooperation with Norway on Forest Law Making and Law Enforcement to Combat Illegal Logging
 - + Cooperation with EU on Illegal Logging Response Center
 - + Cooperation with WWF and ITTO on Control Illegal logging for SFM, dll

33

UNCBD-implementation

- Penetapan kawasan lindung seluas 23,2 juta hektar yang mencakup 41 TN, 171 CA dan 122 TWA
- Pencanaan 9 TN baru, a.l: TN Batang Gadis di Propinsi Sumatra Utara, TN Gunung Ceremai di Jawa Barat, dll
- Pengusulan 2 lokasi Warisan Dunia (World Heritage):
 - 1) Kelompok Taman Nasional yang dikenal sebagai “Tropical Rain Forest Sumatra” (TN Gunung Leuser, TN Kerinci Seblat dan TN Bukit Barisan Selatan)
 - 2) “Trans-boundary World Natural Heritage” (WNH): Lanjak Entimau Wildlife Sanctuary di Kalimantan dan TN Batang Ai di Malaysia
- Sejak awal 2004, *the co-management initiatives* diperkenalkan di sejumlah TN.

34

UNCBD-implementation

- Telah disusun strategi nasional yang memuat rencana aksi untuk mengimplementasikan program konservasi, pemanfaatan keanekaragaman hayati secara lestari dan pembagian keuntungan secara adil atas pemanfaatan sumber genetik, dalam bentuk buku strategi dan rencana aksi nasional (*Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan 2003-2020/IBSAP*)

35

UNFCCC

- United Nations Framework Convention on Climate Change, adopted in 1992
- Calls on countries to control greenhouse gases (GHG)
- > 160 other countries met in Kyoto, Japan, in 1997 and agreed to targets to reduce GHG emissions.
- The Kyoto Protocol makes specific reference to forests as sinks and reservoirs of GHG and calls for the promotion of sustainable forest management practices, afforestation and reforestation.

36

UNFCCC

- Indonesia meratifikasi dengan UU No. 6 Tahun 1996.
- Tujuan konvensi: menjaga kestabilan konsentrasi GRK di atmosfer pada tingkat yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia
- Negara-negara industri dikategorikan dalam negara-negara Annex I dan Annex II mempunyai kewajiban menurunkan emisinya sebesar 5 % dari tingkat emisi tahun 1990 pada tahun 2008-2012

37

UNFCCC

- *Focal point* di Indonesia: Kantor Kementerian Negara Lingkungan Hidup (Meneg LH)
- Emisi Gas Rumah Kaca (GRK): Carbon dioksida (CO₂), Metan (CH₄), Nitrous Oksida (N₂O), Hidrofluorocarbon (HFC5), Perfluorocarbon (PFC5)
- Penyebab GRK: pemanfaatan bahan bakar fosil, konversi hutan, peternakan, dan sampah rumah tangga.
- Tata cara pelaksanaan konvensi diputuskan secara konsensus pada COP

38

UNFCCC

- **Protokol Kyoto (COP 3, 1997)**
Instrumen hukum untuk menerapkan Konvensi:
 1. Penegasan bahwa negara Annex I harus menurunkan emisi GRK
 2. Beberapa mekanisme cara penurunan emisi GRK
 3. Berlaku 90 hari setelah diratifikasi oleh 55 negara yang mencakup 55% total emisi pada 1990.
- Indonesia meratifikasi Kyoto Protocol dengan UU No. 17/2004

39

UNFCCC

- **Cara penurunan Emisi GRK**
 1. Joint implementation: penurunan emisi yang dilaksanakan di antara negara Annex I (34 negara)
 2. Emission trading: penjualan jatah emisi dari dan ke negara Annex B (39 negara)
 3. Clean Development Mechanism (CDM): kemitraan antara Annex I dan Non Annex I
- **CDM:** negara maju memenuhi target penurunan emisi GRK dengan cara membantu negara berkembang dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan

40

UNFCCC

- **Perkembangan CDM**
 - COP 6 (2001): LULUCF, hanya Aforestasi dan Reforestasi dimasukkan dalam kegiatan CDM
 - COP 7, 2001: Aturan CDM keseluruhan termasuk CDM Kehutanan ditetapkan
 - COP 9, 2002: Modalities pelaksanaan CDM Kehutanan
 - COP 10, 2002: CDM Kehutanan skala kecil
- **Definisi**
 - Aforestasi adalah penanaman pohon pada areal yang 50 tahun sudah tidak berhutan
 - Reforestasi adalah penanaman pohon pada areal yang sejak 31 Desember 1989 bukan merupakan hutan

41

UNFCCC-Implementation

- Pembentukan Komisi Nasional Mekanisme Pembangunan Bersih (**Komnas MPB**) sebagai *Designated National Authority (DNA)* → dalam proses di KLH
 - Tugasnya menyatakan bahwa:
 - keikutsertaan negara dalam satu kegiatan proyek CDM adalah sukarela
 - kegiatan proyek membantu negara dalam mencapai pembangunan berkelanjutan
 - Proyek telah mematuhi peraturan nasional tentang lingkungan dan AMDAL
 - Pendapat para pemangku kepentingan telah tuntas ditanggapi dan ditindaklanjuti

42

UNFCCC-Implementation

- **Anggota Komnas MPB**
KLH, DESD Mineral, Dephut, Deperin, Deplu, Depdagri, Deptan, Bappenas, ORNOP
- **Dephut**
Mekanisme tata cara kegiatan AR-CDM diatur dalam Permenhut No. P.14/2004
 - Lahan CDM (Kawasan hutan termasuk hutan adat, Tanah negara, Tanah milik)
 - Persyaratan A/R CDM (memiliki: ijin penguasaan lahan, keterangan lahan untuk A/R CDM, Usulan Proyek)

43

UNFCCC-implementation

- **Dephut:**
 - Kegiatan sosialisasi CDM
 - Proyek *Carbon Fixing Forest Management* in Indonesia dengan biaya hibah dari Jepang (JICA)
 - Inventarisasi dan Identifikasi Taman Nasional dalam rangka kemampuan penyerapan karbon.

44

UNCCD

- United Nations Convention on Combating Desertification, adopted in 1994
- Calls on countries to combat the degradation of land in arid, semi-arid and dry sub-humid areas caused primarily by human activities and climatic variations
- Aims to promote effective action through innovative local programmes and supportive international partnerships.

45

UNCCD

- 'Pertemuan Bumi' tahun 1992 merekomendasikan pembentukan konvensi untuk memerangi pengurusan/ degradasi lahan. Pada tanggal 26 Desember 1996 *United Nations Convention to Combat Desertification* (UNCCD) terbentuk setelah diratifikasi oleh 50 negara. Indonesia meratifikasi konvensi tersebut melalui Keppres No.135/ tgl 28 Agustus 1998
- Semula *UNCCD* terarah kepada negara-negara Afrika. Namun pada perkembangannya tidak terbatas kawasan tersebut
- Pengertian desertifikasi sesuai *article 2 Chapter 12 Agenda 21* mencakup degradasi lahan di daerah *arid, semi-arid, dan sub-humid tropics* sebagai akibat berbagai factor termasuk variasi iklim dan aktifitas manusia.

46

UNCCD-IMPLEMENTATION

- Indonesia adalah negara yang termasuk dalam kelompok “affected country party”. Untuk itu Indonesia telah menyelesaikan kewajibannya menyusun program aksi nasional (*National Action Plan / NAP*) dan menyampaikan kepada Sekretariat UNCCD.
- NAP mengidentifikasi hal-hal yang mendasari terjadinya degradasi lahan dan kekeringan dan sekaligus langkah-langkah mencegah dan merehabilitasi
- Program diarahkan untuk memecahkan masalah degradasi lahan di tiga propinsi terkering di Indonesia, yaitu: NTT, NTB dan Sulteng.
- Pada pertemuan Bali (Juli, 2003) Indonesia menjadi koordinator untuk Sub-regional Asia Tenggara. Pada pertemuan tersebut dihasilkan *South East Asia Sub-Regional Action Programme*.

47

AFP

- Asia Forest Partnership, created at the WSSD in Johannesburg in 2002 by four leading partners –the Governments of Japan & Indonesia, CIFOR, and TNC
- A multi-stakeholder partnership for sustainable development formed to address issues of SFM in the Asian region – promote SFM
- Three focus area:
 - control of illegal logging and its associated trade
 - control of forest fires
 - rehabilitation and reforestation of degraded lands and forest).

48

EAP FLEG

- East Asia Pacific Forest Law Enforcement and Governance
- A partnership among the World Bank, Indonesia, the United Kingdom (UK) and the U.S. that culminated in the East Asia Ministerial Conference on FLEG in Bali, Indonesia. September 11-13, 2001
- The Conference adopted a Ministerial Declaration, whereby participating countries commit themselves to intensify national efforts and strengthen bilateral, regional and multilateral collaboration to address forest crime and violations of forest law, and to create a regional task force on FLEG to advance the Declaration's objectives.

49

THANK YOU



50

**PELATIHAN BUDIDAYA
JAMUR TIRAM
(*Pleurotus sp.*)**



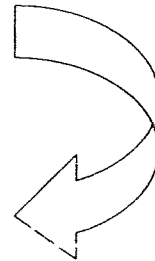
PELATIHAN BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN PASCA PANEN TUMBUHAN OBAT



Tanaman Rempah dan Obat

Memiliki nilai strategis

Penghasil devisa
Bahan baku industri
Penyerapan tenaga kerja
Kesehatan dan kecantikan



Mandat Komoditas Penelitian

Tanaman Rempah

Lada, cengkeh, panili, pala, kayumanis, kapolaga



Tanaman Obat

Empon-empon (Jahe, kencur, kunyit dll)



Tanaman Minyak Atsiri

Nilam, ylang-ylang, kenanga, akar wangi, mentha, dll.



Aneka Tan. Perkebunan

J. mente, melinjo, kemiri, makadamia



Tanaman Pestisida Nabati

Mimba, melaleuca, piretreum, dll



OBAT ASLI INDONESIA

- 40.000 JENIS FLORA YANG TUMBUH DI DUNIA
- 30.000 JENIS TUMBUH DI INDONESIA
- 26 % TELAH DI BUDIDAYAKAN
- 74 % TUMBUH LIAR DI HUTAN-HUTAN
- 940 JENIS DIGUNAKAN SEBAGAI OBAT TRADISIONAL



Cenderung pemakaiannya meningkat (untuk industri, farmasi, kosmetika, makanan dan minuman)

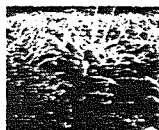
EKSPOR PERTAHUN

HONGKONG I ⇒ 730 ton US\$ 526,6 Ribu

SINGAPURA II ⇒ 582 ton US\$ 647 Ribu

JERMAN III ⇒ 155 ton US\$ 112,4 Ribu

TANAMAN OBAT UNGGULAN MENURUT POM



- MENGKUDU
- SALAM
- JAMBU BIJI
- JATI BELANDA
- TEMU LAWAK
- CABE JAWA
- SAMBILOTO
- KUNYIT
- JAHE MERAH

Ekspor Komoditi Produksi Tanaman Obat

Tujuan Ekspor	Jahe	Kencur	Kunyit	Temulawak	Kapolaga	Kumis Kucing
ASIA :						
Arab Saudi	+	+	+	+	+	+
Cina	+	+	+	+	+	+
Filipina	+	-	-	+	+	+
India	+	-	+	-	+	+
Jepang	+	+	+	+	+	+
Korea	+	+	+	+	+	+
Malaysia	+	-	-	-	+	+
Singapura	+	-	-	-	+	+
Taiwan	+	-	-	+	+	+
EROPA :						
Belanda	+	+	+	+	+	+
Belgia	+	+	-	-	+	-
Denmark	+	-	-	-	-	-
Inggris	-	+	+	+	-	+
Italia	+	-	-	-	+	+
Kanada	-	+	-	-	-	-

Ekspor Komoditi Produksi Tanaman Obat

Tujuan Ekspor	Jahe	Kencur	Kunyit	Temulawak	Kapolaga	Kumis Kucing
Portugal	+	-	-	+	-	+
Prancis	-	+	-	+	-	-
Spanyol	+	+	-	-	-	-
Swedia	+	-	-	-	+	+
Jerman	-	-	-	-	-	+
AMERIKA :						
Argentina	-	+	-	-	+	+
Meksiko	+	-	+	-	+	+
USA	+	-	+	-	+	+

Keterangan : + = Tujuan ekspor komoditas tanaman obat dari Indonesia

- = Tidak mengimpor komoditas tanaman obat dari Indonesia

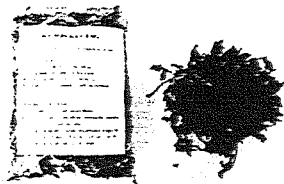
KOMPONEN SENYAWA

Garam kalium, senyawa saponin, alkaloid, minyak atsiri, glikosida, orthosiponin, tanin, asam organic → senyawa sinensetin. Anti inflamatory (anti radang), peluruh air seni (diuretic), penghancur batu saluran kencing

Produksi dan mutu simplisia dan kandungan bahan aktif, ditentukan cara budidaya dan pasca panen

PENYAKIT YANG DAPAT DISEMBUKAN DAN CARA PENGGUNAANNYA

- **Infeksi kandung kemih** : Batu dalam kandung kemih 5 – 20 helai daun kumis kucing direbus dengan setengah gelas air dan diminum 2 kali sehari.
- **Sakit kencing batu** : 4 – 7 helai daun kumis kucing, 7 tanaman meniran, rebus dengan dua gelas air hingga tinggal setengahnya, minum 3 kali sehari.



- **Batu kantung empedu.** Segenggam daun kumis kucing, sejempol kunyit, 7 helai daun ungu, dua siung bawang putih, digiling, ditambah sepotong kayumanis. Rebus dalam satu setengah liter air hingga tinggal setengahnya. Minum air rebusan itu dua kali sehari.
- **Encok :** 4 – 5 helai daun kumis kucing, 4 – 5 tanaman meniran, rebus dengan air bersih hingga tinggal setengah bagian. Minum beberapa kali sehari.
- **Menghilangkan panas dan lembab serta masuk angin.** Tanaman kumis kucing sebanyak 30 – 60 g (kering) atau 90 – 120 g (basah) direbus dan minum, atau daun basah/kering diseduh sebagai teh.
- **Bengkak kandung kemih.** Kumis kucing, *Plantago mayor* (daun sendok) dan *Hedyotis corymbosa* (rumput lidah ular) semuanya direbus, airnya diminum.
- **Infeksi saluran kencing.** Sering kencing sedikit-sedikit (anyang-anyangan). Kumis kucing, meniran (*Phyllanthus urinaria*), *Commelina communis*, masing-masing 30 g, direbus.
- **Kaputihan.** Daun kumis kucing dan beluntas masing-masing 1 genggam, jinten hitam 1 sendok teh dan kemukus 10 biji, direbus dan minum 2 kali sehari.

KOMPONEN SENYAWA

**Daun : Epfricelinol, Lupeol, Stigmasterol,
triacontan-1-ol, Lupeol acetat,
deoxyelephan topin,
isodeoxyelephantopin**

Bunga : Luteolin 7-glucoside

PENYAKIT YANG DAPAT DISEMBUKAN DAN CARA PENGGUNAANNYA

- **Hepatitis** : 120 – 180 gram akar segar direbus dengan daging. Minum selama 4 – 5 hari.
- **Biri-biri** : 30 – 60 gram seluruh tanaman tambah 60 – 120 gram tahu dan air secukupnya di tim, makan.
- **Perut kembung** : batang tapak liman 60 gram, direbus, bagi 2 kali minum.
- **Influenza, demam, peradangan amandel, radang tenggorokan, radang mata** : tanaman kering 15 – 30 gram direbus.
- **Dysentri, diare, gigitan ular** : tanaman kering 15 – 30 gram direbus.
- **Epidemic encephalitis, batuk seratus hari (pertusis)** : tanaman kering 15 – 30 gram direbus.

- **Radang ginjal yang akut dan kronis** : tanaman kering 15 – 30 gram direbus.
- **Kurang darah** : tanaman kering 15 – 30 gram direbus.
- **Radang rahim, keputihan** : tanaman kering 15 – 30 gram direbus atau tiga batang tanaman + akar direbus dengan 3 gelas air tinggal 2 gelas, minum sehari 2 kali satu gelas.
- **Mempermudah proses kelahiran, pengobatan sesudah bersalin** : tanaman kering 15 – 30 gram direbus.
- **Pelembut kali, peluruh dahak, peluruh haid, pembersih darah** : tanaman kering 15 – 30 gram direbus.
- **Meningkatkan gairah pria** : tiga batang tanaman bersama akarnya dimasukkan ke dalam 3 gelas air, kemudian direbus sampai tinggal 2 gelas, minum sehari 2 kali satu gelas.

Karakter morfologi 3 klon harapan Kencur

No.	Kencur tipe	Jumlah tunas	Lebar daun (cm ²)	Produksi	
				Gram/rumpun	Ton/ha
1.	Boyolali	7.60	41.97	32.15	8.49
2.	Cileungsi Kecil	7.20	50.71	35.75	9.47
3.	Cileungsi Besar	8.14	64.57	62.23	16.43



Tanaman Aprodisiak

Tumbuhan	Kegunaan
Purwoceng <i>Pimpinella prucan Mock</i>	<ul style="list-style-type: none"> •Menguatkan syahwat (aprodisiak) •Menguatkan badan (tonik) •Melancarkan kencing (diuretica)
Cabe jawa <i>Piper retrofractum Vahl.</i>	<ul style="list-style-type: none"> •Menguatkan syahwat •Perut kembung •Muntah-muntah •Menambah nafsu makan •Peluruh keringat, encok •Tekanan darah rendah •Sukar bersalin

KEMBALI KE AZAS :

“PRINSIP SISTEM KEDIRIAN”

- > Penduduk miskin : 38,5 juta orang
- > Pengangguran : 40 juta orang
- > Anak usia sekolah/tak bisa sekolah: 11 jt. orang
- > Pecandu Narkoba : 6 juta orang
- > Pengungsi : 1 juta orang
- > Hutang Negara : Rp.160 trilyun
- > Kriminalitas ???!!!
- > Bencana Alam : gempa, tsunami, banjir, dll ?!

- > Penegakan Hukum/Keadilan ???!!!

HUTAN HILANG???

1980-an = 1.000.000 ha/tahun
1990-awal = 1.700.000 ha/tahun
Sejak 1996 = 2.000.000 ha/tahun
= 5.480 ha/hari
= 228 ha/jam
Equivalent dengan :
3 x Luas Kebun Raya/jam
4 x Lapangan sepak bola/menit

Hipotesis :

Itu semua terjadi karena manusia "melanggar"
SUNATULLAH (Kaidah Alam) : "*Prinsip Keunikan
dan Hirarki Sistem Kedirian*"

Azas Keunikan Sistem Kedirian

- Merupakan pijakan operasional dalam wadah *rukun keluarga*, yang berpasangan dengan *azas hirarki sistem kedirian*.
- **Sistem keluarga itu berlapis.**
misalnya, kita mengenal *keluarga tatasunya* dengan *matahari* sebagai *induknya*, dan *planet-planet* sebagai turunannya (F1).
- Planet-planet itu ada yang punya satelit yang berperan sebagai F2, berikut semua benda yang berada dalam pangkuan planet, misalnya pulau, gunung, laut, sungai dan udara sebagai contoh turunannya.

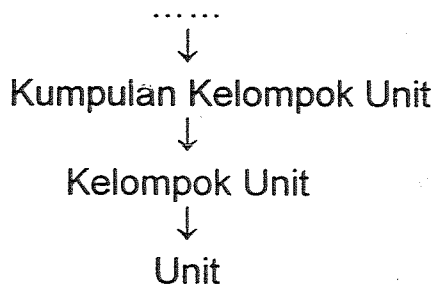
Prinsip keunikan sistem kedirian berpijak kuat pada azas kekeluargaan.

Pada hakikatnya keterikatan sesuatu atau seseorang pada yang lain mulai dari unit keluarga yang terkecil sampai pada sistem keluarga yang besar, yang maknanya lebih penting dari dirinya.

Dengan demikian secara prinsip segala sesuatunya di alam mempunyai keunikan dan hirarki yang seimbang dan harmonis, mulai dari unit yang terkecil (atom atau molekul) sampai yang terbesar (alam jagad raya).

Prinsip bahwa :

Individu ↔ Kelompok ↔ Kumpulan Kelompok ↔



Masing-masing merupakan sebuah sistem yang memiliki karakteristik yang khas/unik dan bersifat hirarkis.

Falsafah Hirarki Keluarga

- Tuhan menciptakan seluruh makhluk-Nya sebagai *satu kesatuan keluarga*.
- Tiada suatu ciptaan-Nya yang tidak tergantung pada ciptaan-Nya yang lain,
- Hubungan itu mencerminkan *hubungan keluarga "besar"*, saling mengisi dan saling membutuhkan !

Yang lebih tinggi tidak mengeksploitir yang lebih rendah

- Atom oksigen berperan sebagai sistem kedirian bagi seluruh elektron orbital yang dimilikinya,
- Elektron yang mengorbit atom hidrogen unik, tidak bisa digantikan fungsinya oleh elektron dari oksigen, meskipun demikian dia tetap tunduk pada *sistem kedirian* yang lebih tinggi, berupa air (H₂O)
- Sistem kedirian yang lebih tinggi di alam tidak pernah mengeksploitir sistem kedirian yang lebih rendah, bahkan sebaliknya dia melindungi yang lebih rendah.

Hubungan Laut dan Sungai

- Laut dan samudera → satu sistem unik kedirian yang hirarkinya lebih tinggi dibanding sungai.
- Laut secara alami senantiasa menampung semua air sungai, termasuk limbah sekalipun,
- Laut tidak pernah mengintervensi balik sistem kedirian sungai.
- Laut tidak pernah mengintervensi balik sistem kedirian sungai.
- Sekiranya ini terjadi akan menimbulkan bencana tsunami, banjir dan kerusakan yang dahsyat, seperti yang terjadi di Aceh, Srilanka, Thailand pada tanggal 26 Desember 2004 yang lalu.

Perkembangan sistem keluarga terus berlanjut mulai bagian terhalus benda-benda, seperti molekul dan atom, mikro-organisme, individu-individu tumbuhan dan hewan, populasi, ekosistem dan sampai ke biosfer bumi

Mungkin sebuah atom merupakan F (keturunan) kesekian juta dari sistem keluarga yang bernama bumi.

Hal ini menakjubkan, karena masing-masing benda bisa berperan sebagai *sistem kedirian* yang mandiri.

Masing-masing merupakan sebuah sistem yang memiliki karakteristik yang khas/unik dan bersifat hirarkis.

Azas keunikan sistem kedirian berpasangan dengan azas hierarki sistem kedirian merupakan contoh hub.otonomi dalam kehidupan keluarga, contoh otonomi hub.keluarga di ekosistem hutan hujan tropika, keluarga mikro-organisme sebagai dekomposer, tumbuhan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Begitu harmonis dan begitu indahnya !.

Perkembangan sistem keluarga terus berlanjut mulai bagian terhalus benda-benda, seperti molekul dan atom, mikro-organisme, individu-individu tumbuhan dan hewan, populasi, ekosistem dan sampai ke biosfer bumi

Kelestarian keanekaragaman hayati sangat tergantung kepada kelestarian "keluarga yang lebih besar", yaitu kelestarian ekosistem hutan dan ekosistem laut. Keadaan seperti inilah yang belum terwujud dalam kehidupan sosial, seperti yang diungkapkan oleh Fritjof Capra (1999) dalam bukunya "Menyatu dengan Semesta" (*Belonging to the Universe*), karena pikiran dan kesadaran manusia masih belum ditata sebagaimana *konstruksi al fitrah dan al khalifah*.

Berjalannya sistem-sistem tersebut harus disertai dengan adanya **KEBEBASAN & KETERTIBAN !!!**

Karena uniknya sebuah sistem, maka setiap sistem :
tidak boleh mengintervensi sistem di bawahnya !

→ **KEBEBASAN**

harus tunduk pada aturan main dlm sistem di atasnya!

→ **KETERTIBAN**

Itulah **SUNATULLAH** (Kaidah Alam) :
"Prinsip Keunikan dan Hirarki Sistem Kedirian"

Hakekat Fitrah Manusia

- Tuhan menciptakan manusia dalam kelompok-kelompok dan dalam suku bangsa di bumi,
- Artinya eksistensi kelompok, suku dan bangsa bukan sesuatu yang diada-ada oleh manusia, melainkan hakekat dari fitrah manusia itu sendiri
- Agar mampu hidup mandiri, saling kenal mengenal, saling membantu dan mengisi, bukan saling menyakiti, apalagi saling membunuh dll.

Sistem Sosial Politik :

NKRI dengan sistem Sentralisasi

Struktur pemerintahan : RT, RW, Desa,

→ Kepala suku, Kepala adat, Nagari terpinggirkan

"Sawahnisasi", "padinisasi"

→ Jagung, ubi jalar, sagu terpinggirkan

Pelayanan Kesehatan : Puskesmas

→ Obat tradisional terpinggirkan

→ Ketergantungan obat & IPTEK impor tinggi

Dsb.

Pembangunan SOSEK yang terjadi

- Kenyataannya, pelaksanaan pembangunan sosial ekonomi di kebanyakan negara di dunia dan termasuk Indonesia belum menerapkan "prinsip keunikan dan hirarki sistem kedirian",
- sehingga terjadilah pengeksploitasian :
suatu negara oleh negara lainnya,
suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya,
masyarakat kota terhadap masyarakat desa (petani),
majikan terhadap buruh, pengusaha terhadap sumber daya alam (termasuk hutan),
penguasa/pemerintah terhadap rakyatnya,
dan sebagainya.

Implikasi khronis

Menimbulkan kekacauan global, peperangan, terancamnya perdamaian dan persatuan umat manusia di dunia.

**Pasti ini ada sesuatu yg salah !
Ilmu Ekonomi yang Fertil**

Kebijaksanaan konvensional dari apa yang sekarang diajarkan sebagai ilmu ekonomi tidak menyangkut golongan miskin, golongan yang justru membutuhkan manfaat pembangunan ekonomi.

Ilmu ekonomi yang memuja ukuran raksasa dan otomatisasi itu adalah sisa-sisa dari kondisi abad ke-19, cara pemikiran abad ke-19 yang sama sekali tidak mungkin dapat memecahkan masalah nyata zaman ini.

Kelangsungan hidup manusia

"Kelangsungan hidup bangsa atau negara itu sebenarnya bukanlah menjadi tujuan, yang ada dan menjadi tujuan hanyalah masalah kelangsungan hidup manusia: manusia, pribadi-pribadi seperti anda dan saya, dapat hidup terus jika mereka dapat berdiri di atas kaki sendiri dan berpenghasilan!"

Sistem Pendidikan :

- manusia pengejar gelar
- manusia gudang pustaka (textbook- thinking, menghasilkan "kebodohan orang² pintar"
Indoktrinasi yg memasung kreatifitas
- pendidikan/gelar tidak berkorelasi dengan kemampuan daya kreativitas untuk menjawab/memecahkan permasalahan yang berkembang di masyarakat

Akar Permasalahan Sistem Pendidikan

- Sekolah dan universitas telah dipisahkan dari soal-soal kehidupan nyata sehari-hari.
- Ia telah berubah menjadi semacam sekolah militer yang diisi indoktrinasi yang memasung kreatifitas individu setiap murid.

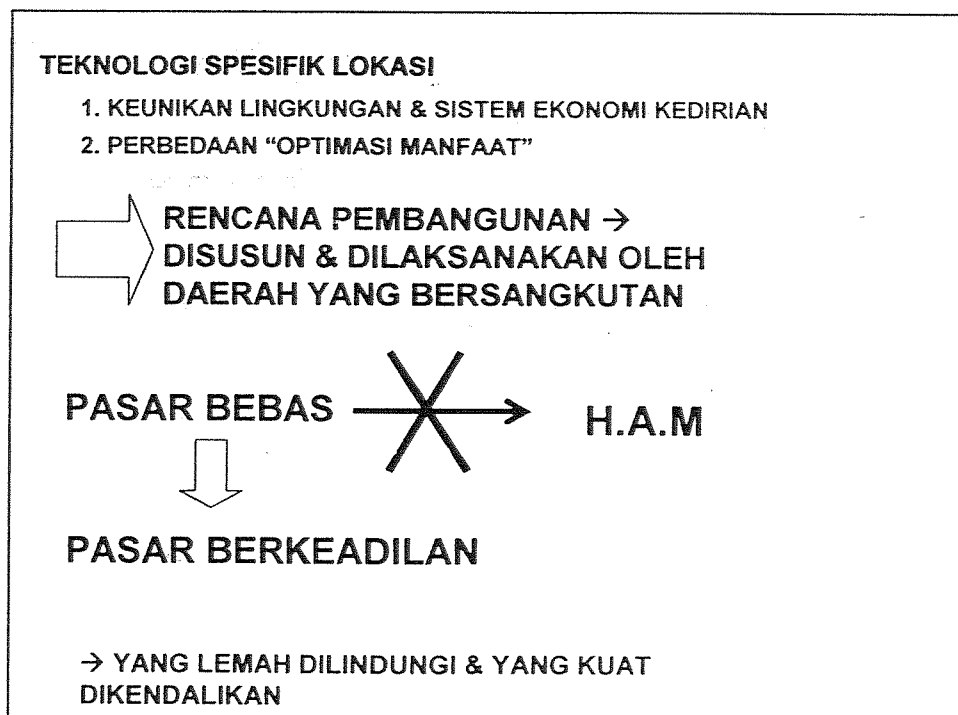
Fungsi Guru

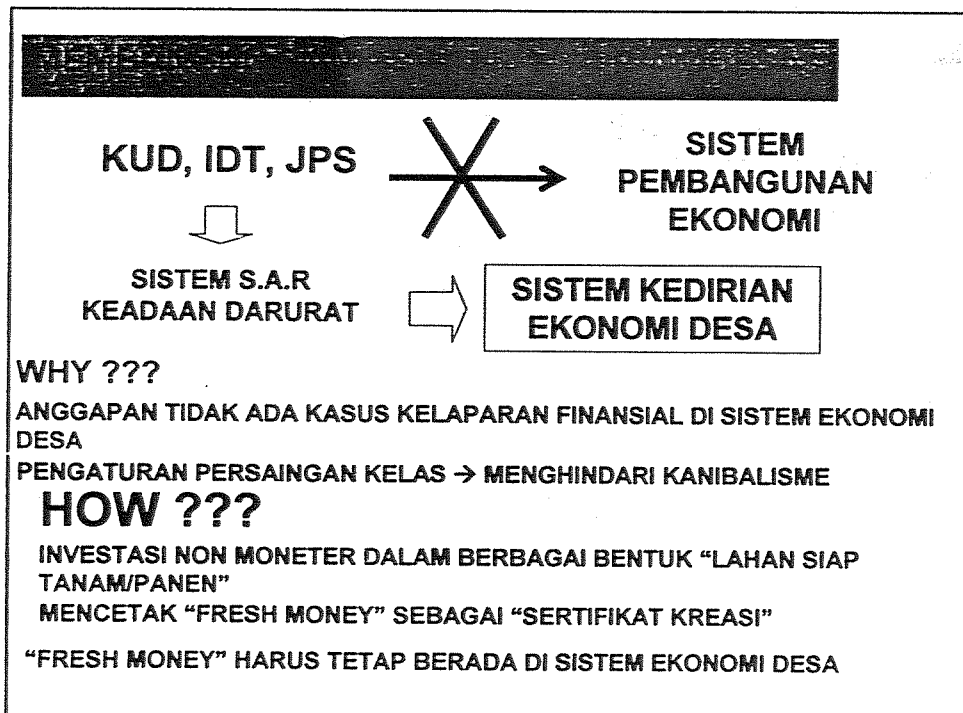
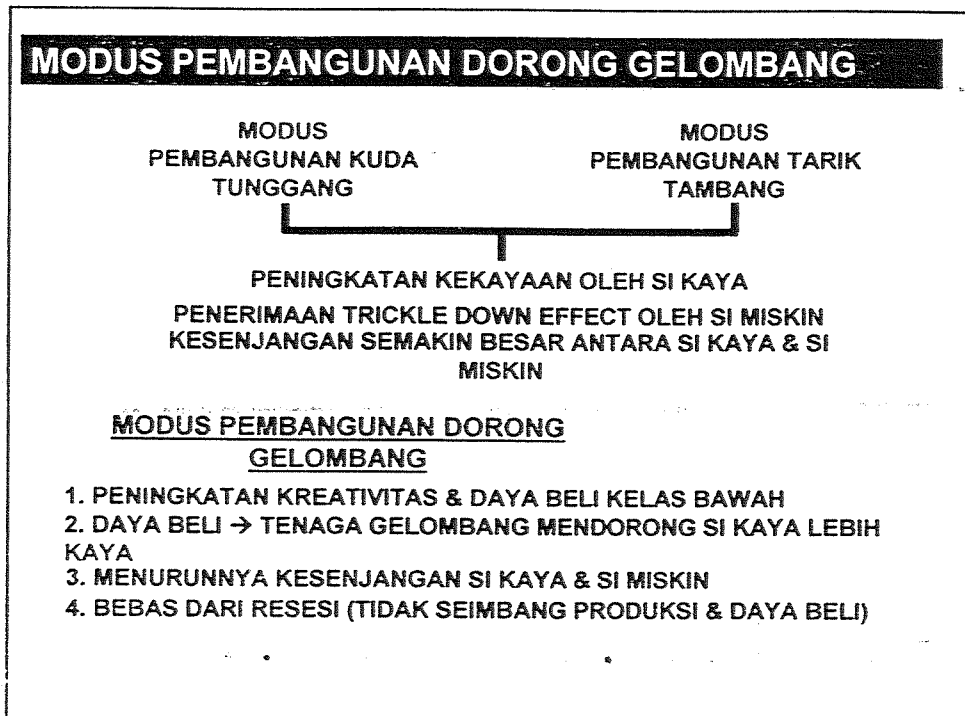
- Sebenarnya seorang guru tidak bisa memberikan ilmu, karena ilmu itu bukan miliknya, melainkan seorang guru tidak lain hanya menyiapkan si murid agar bisa menerima dan mengembangkan ilmu dari Allah !

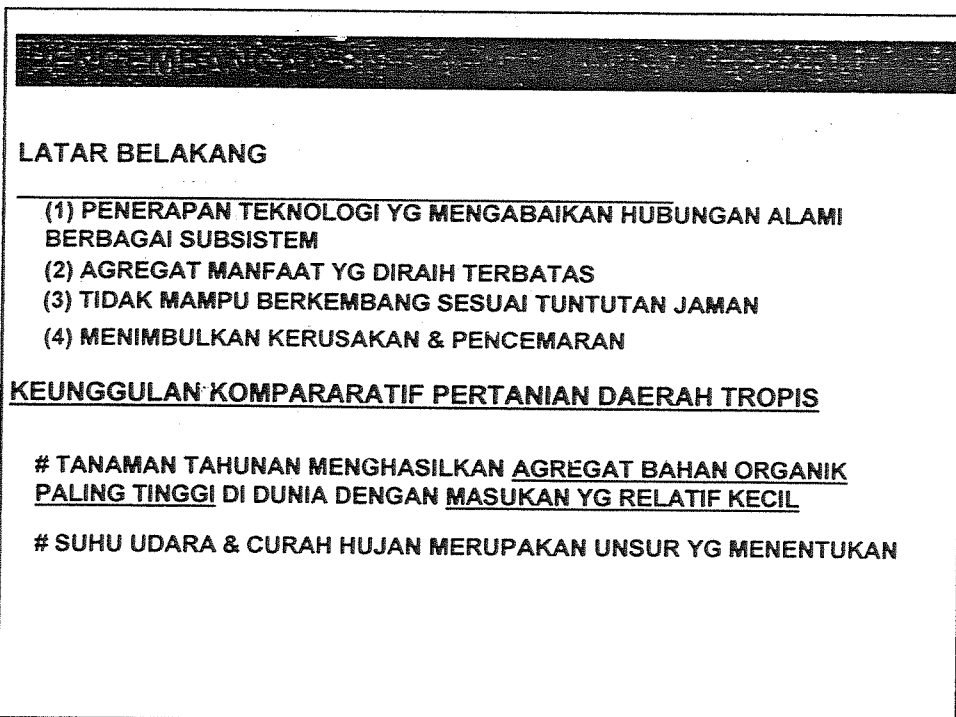
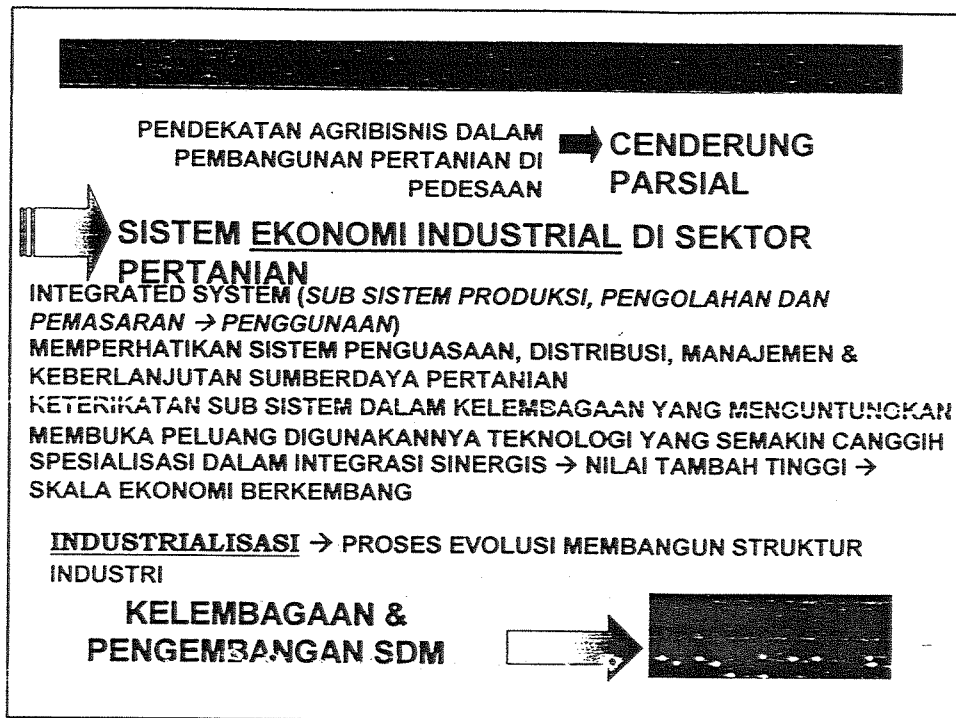
Kesalahan Guru

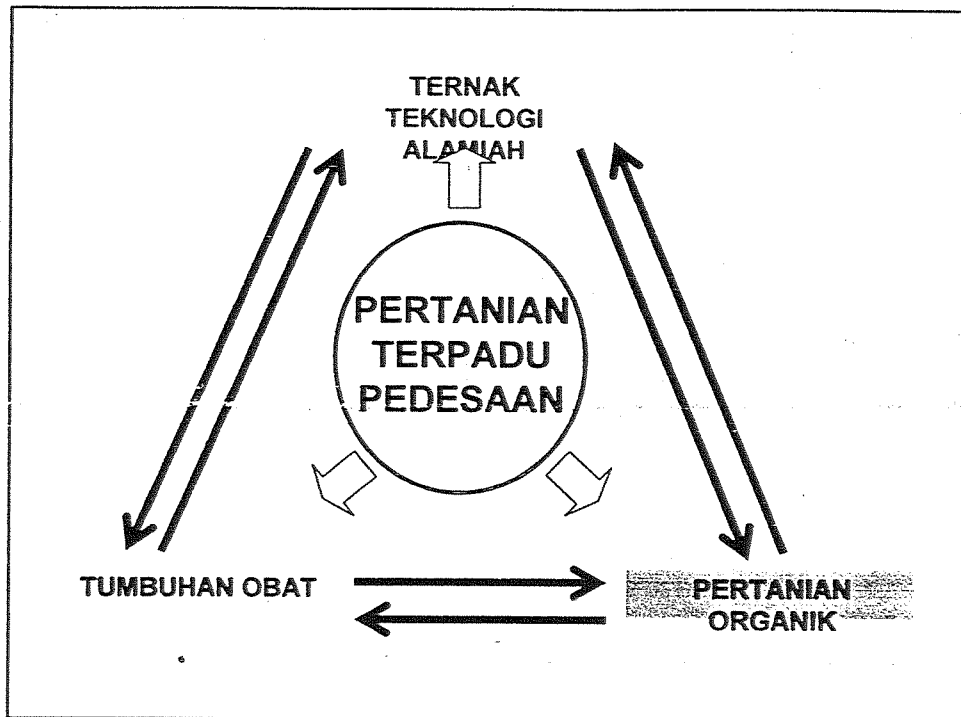
- *Kesalahan atau bahkan dosa terbesar para guru dan dosen, adalah terlalu banyak melakukan pengajaran dan pelatihan, namun hampir tidak pernah melakukan pendampingan (mentorship) terhadap siswa, mahasiswa, untuk mengejar dan mencari jati dirinya sebagai pribadi, lalu sebagai anggota kelompok, dan sebagai bagian dari organisasi, serta sebagai bagian dari sebuah masyarakat bangsa bernama Indonesia, dan akhirnya sebagai manusia warga masyarakat dunia.*
- *Jika kita sampai pada dunia pikiran, azas atau etika, perdamaian, maka harus kita akui bahwa kesatuan umat manusia itu ada dan dengan sendirinya kita harus mendasarkan tindakan kita atas azas bahwa seluruh umat manusia itu bersaudara dan setiap manusia punya hak untuk menikmati ketertiban. Sekaligus setiap individu "manusia" berkewajiban dan berperan sebagai khalifah, berfungsi sebagai wakil Tuhan di bumi, yaitu menjalankan sifat-sifat pengasih dan penyayang !*
- *Keragaman tipe psiko-spiritual, keragaman keunikan setiap sistem kedirian tidak akan menimbulkan konflik dan perpecahan, melainkan keragaman yang mencerminkan keindahan dan dinamika Bhinneka Tunggal Ika, keragaman yang mendatangkan rahmat dan keseimbangan !*

- **Sekarang kita membutuhkan suatu sistem yang sama sekali baru, suatu sistem yang berdasarkan perhatian pada orang, bukan pada barang-barang (barang-barang itu toh akan beres sendiri!). Dalam satu kalimat, sistem "production by the masses, rather than mass production" (produksi oleh massa, bukan produksi secara massal).**
- **Akan tetapi, apa yang tidak mungkin dalam abad ke-19 adalah mungkin sekarang. Dan apa yang tidak diacuhkan orang dalam abad ke-19, sekarang sungguh-sungguh sangat mendesak.**
- **Marilah secara sadar kita menggunakan potensi teknologi dan ilmu kita yang maha besar untuk melawan dan memerangi kemelaratan dan kemerosotan martabat manusia, suatu perjuangan dalam hubungan yang mesra dengan manusia yang nyata, dengan perorangan, dengan keluarga, dengan kelompok kecil, bukannya dengan negara dan pengertian-pengertian abstrak yang lain.**
(Schumacher, 1973)









Penutup :

Sekarang ini "reformasi total" dibutuhkan,
mulai dari setiap individu, keluarga, kelompok masyarakat,
maupun setiap bangsa di dunia !

Mulai dengan Tata Kehidupan Sosial "Baru" menuju
Masyarakat Manusiawi,

Adil dan Makmur, Damai dan Bersaudara, Masyarakat Dunia
yang Bersatu

Tidak ada alternatif lain, kecuali : Kembali ke azas "keunikan
sistem kedirian" dan azas "hirarki sistem kedirian" !

Kembali ke ai Fitrah, *Back to Nature* !

Kembali ke falsafah Pancasila yg sebenarnya !

Kembali kepada jalan keTuhanan ! Dzikrullah

Lampiran 1

SUSUNAN ACARA

Acara : Simposium Nasional Dunia Kehutanan
 Waktu : Senin – Selasa, 5 – 6 September 2005
 Tempat : Ruang Sidang Sylva Fakultas Kehutanan IPB
 Tema : “Kebangkitan Menuju Pembinaan dan Pembangunan Kehutanan Indonesia

Susunan Acara :

Hari 1

Waktu	Kegiatan	Narasumber
07.00-08.00	Registrasi	Panitia
08.00-08.30	Pembukaan PIKNAS III Tahun 2005	Wakil Rektor III IPB Pror. Dr. Ir. Yusuf Sudohadi, M.Agr
08.30-09.30	Keynote Speaker	Menteri Kehutanan RI MS. Kaban
09.30-09.50 09.50-10.10 10.10-10.30 10.30-10.50 10.50-11.10	Makalah I : ”Kupas Tuntas Pemberantasan Illegal Logging dan Tindak Lanjut Pembangunan Kehutanan Di Masa Mendatang”	Mahasiswa (Nuralim) Komisi IV DPR RI (Ir. H. Suswono, MMA) Kejaksaan Agung RI (Dr. Marwan Effendy, SH. MM.) Dirjen PHKA (Agus Djoko Ismanto) Akademisi (Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, MM)
11.10-11.45	Diskusi	
11.45-12.00	Hiburan	
12.00-13.00	Rehat	Panitia
13.00-13.30	Pembukaan <i>Forestry Expo</i>	
13.30-13.50 13.50-14.10 14.10-14.30 14.30-14.50	Makalah II : ”Kupas Tuntas Pengelolaan Hutan Di Era Otonomi Daerah ”	Dirut PT Sari Bumi Kusuma (Nana Suparna) LSM (Muayat Ali Muhshi) Dirjen Otonomi Daerah, Depdagri (Dr. Made Suwardi, M. Soc. Sc Mahasiswa (Herdiansah)
14.50-15.20	Diskusi	
15.20-15.45	Penutupan Hari 1 dan Pengumuman-pengumuman	

Hari 2

Waktu	Kegiatan
07.00-08.00	Registrasi peserta
08.00-08.30	Makalah III oleh Bapak Ngadiono
08.30-09.30	Diskusi
09.30-10.15	<i>Coffee Break</i>
09.15-12.00	Sidang Komisi : 1. Pemberantasan Illegal Logging dan Tindak Lanjut Pembangunan Kehutanan Di Masa mendatang 2. Pengelolaan Hutan Di Era Otonomi Daerah
12.00-13.00	Rehat
13.00-15.00	Lanjutan Sidang Komisi
15.00-15.30	Istirahat + sholat
15.30-18.00	Lanjutan Sidang Komisi
18.00-19.30	Sholat + makan malam
19.30-22.45	Lanjutan sidang Komisi
22.45-23.00	Sidang pleno dan perumusan hasil simposium nasional
23.00-23.30	Penutupan simposium nasional

Acara : *International Forestry Policy Dialogue And Simulation*
 Waktu : Rabu, 7 September 2005
 Tempat : Auditorium Toyyib Fakultas Pertanian IPB
 Tema : "Kebijakan Kehutanan International"

Susunan Acara :

Waktu	Kegiatan	Narasumber
08.30-09.00	Persiapan dan registrasi	
09.00-09.15	Sambutan ketua panitia	Joko Muldo I.
09.15-09.30	Sambutan Ketua BEM Fakultas Kehutanan IPB	Herdiansah
09.30-10.00	Pengenalan International Forest Policy	S.I. Galuh Sekar Arum
10.00-10.45	Makalah I : Pembahasan Mengenai Mekanisme Global	Departemen Luar Negeri RI (Dewi Safitri Wahab)
10.45-11.30	Makalah II : Implementasi dan Implikasi Kebijakan Kehutanan International	Departemen Kehutanan RI (Eri Indrawan)
11.30-12.00	Dialog Interaktif	
12.00-13.00	Rehat	
13.00-13.30	Pembagian peserta dalam Stakeholder-stakeholder	
13.30-14.15	Simulasi	
14.15-15.00	Evaluasi	Narasumber
15.00-15.30	Penutupan	

Acara : Pelatihan Budidaya Jamur Tiram (*Pleurotus sp.*)
 Waktu : Kamis, 8 September 2005
 Tempat : Fakultas Kehutanan IPB

Susunan Acara :

Waktu	Kegiatan	Narasumber
08.00-08.30	Registrasi peserta	
08.30-08.40	Sambutan Ketua panitia	Guruh Afrianto
08.40-08.50	Sambutan Ketua FMSC Fakultas Kehutanan IPB	Fitria Kurniawan
08.50-09.00	Sambutan Ketua Departemen Silviculture dan pembukaan	Dr. Ir. Irdika Mansur, M.For.Sc
09.00-09.50	Makalah I : Peranan Jamur Untuk Kehidupan	Ir. Elis Nina H, Msi
09.50-10.15	Makalah II : Pelatihan pembuatan Media Jamur Tiram	Anang Pranoto Hidayat, S.Hut
10.15-10.30	Tanya jawab	
10.30-12.00	Praktek I : Pencampuran, pengemasan media dan sterilisasi	Petugas Lab. Patologi Fakultas Kehutanan IPB
12.00-13.00	Rehat	Panitia
13.00-14.00	Praktek II : Inokulasi, pemeliharaan dan pemanenan	Petugas Lab. Patologi Fakultas Kehutanan IPB
14.00-14.30	Pengisian kuisioner dan penutupan	Panitia

Acara : Pelatihan Budidaya dan Pengolahan Pasca Panen Tumbuhan Obat
 Waktu : Sabtu, 10 September 2005
 Tempat : Balai Penelitian dan Tanaman Rempah dan Obat, Bogor

Susunan Acara :

Waktu	Kegiatan	Narasumber
07.00-07.30	Registrasi peserta	
07.30-08.30	Perjalanan menuju Balitro	
08.30-09.00	Pembukaan	Penanggungjawab (Abdul Syakur)
09.00-10.00	Pengenalan tanaman obat	Petugas Balitro
10.00-11.00	Pengenalan lapang tanaman obat	Petugas Balitro
11.00-12.00	Praktek pengolahan tanaman obat	Petugas Balitro
12.00-13.00	Rehat	
13.00-15.00	<i>Talk Show</i> "Tanaman Obat dan Seluk Beluknya"	Dr. Ir. Ervizal AM zuhud, Msi
15.00-15.30	Sholat Asar	
15.30-16.30	Perjalanan pulang ke Darmaga	

Lampiran 2

SUSUNAN KEPANITIAAN PIKNAS III 2005

Pelindung

Prof. Dr. Ir. Cecep Kusmana
(Dekan Fakultas Kehutanan IPB)

Penasehat

Dr. Ir. H. Sambas Basuni, M.S
(Sekretaris Fakultas Kehutanan IPB)

Pembina

Prof. Dr. Dudung Darusman
Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, MSc

Penanggungjawab

Herdiansah
(Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kehutanan IPB)

Panitia Pengarah

- Laela Qodariah ➤ Mustaghfirin
- Dyah Nur Isnaeni ➤ Widyo P
- Riko Nofra P
- Ketua-Ketua Lembaga Fakultas Kehutanan IPB

Panitia Pusat

Ketua Pelaksana	: Radhimas Firmansyah
Sekretaris	: Shinta Dewi Wisnu Wijayanti
Bendahara	: Nurbandiah

Divisi – Divisi :

1. Divisi Kesekretariatan

Koordinator	: Nurul Istiqomah
Anggota	:
1. Yanuar Candra	3. Riska Indriyanti
2. Indriani Syafitri	

2. Divisi Acara

Koordinator	: Guruh Wisnu Wardhana
Anggota	:
1. M. Ramli	4. Yofi Mayalanda
2. Feby Muryanto	5. Rinaldo
3. M. Ilyas	

3. Divisi Dana Usaha

Koordinator : Mujahid
Anggota : I. Adli Kusumawinata

4. Divisi Logistik dan Transportasi (Logstran)

Koordinator : Hendry Ramadani
Anggota :
1. Mahali
2. Adhi Surya Perdana
3. Bakti Abu Birgantara
4. Mujinius Jalaraya

5. Divisi Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi

Koordinator : Sofyan Prayitno
Anggota :
1. Annisa Tasya
2. Agung Setyadiwijaya
3. Resa Irnano
4. Dwi Retno

6. Divisi Konsumsi

Koordinator : Endartya Nur Sholikah
Anggota :
1. Ella Nurhayati
2. Tridasa A Saika

7. Divisi Humas

Koordinator : Ahmad Sahab
Anggota :
1. Endang Asri Mardina
2. Sandrio Ivanus
3. Nurul Husna

Panitia Lokal

1. Simposium Nasional Dunia Kehutanan

Koordinator : Adam Palupi
Anggota :
1. Nuralim
2. Agus Rahmat
3. M. Idham Alim
4. Adeng Hudaya
5. Welly Dwi Wahyuni
6. Wien Setyo Budi Irawan

2. *International Forestry Policy Dialogue and Simulation*

Koordinator : Joko Multo Ichtianto
Anggota :
1. Luthfi R. Yusuf
2. Karlina Fitri K.
3. Eka
4. Arief Kurniawan N.
5. Zaenal Abidin
6. Afini Juwitasari
7. Agista
8. Rizka Hasni
9. Danang
10. Ardi Yoga

3. Pelatihan Budidaya Jamur Tiram (*Pleurotus sp.*)

Koordinator : Guruh Afriantho
Anggota :
1. Dhany Saptadji P.
2. Novi Herna Wati

3. Kurniawati Wulandari
4. Mariyana Ulfah
5. Mahali
6. Erna Wiratnaningsih
7. Elza Havid
8. Novita Diah Aryanti
9. Rr. Mita Ramayati
10. Nenih
11. Yuniar Artanti

12. Armelia Primayuna
13. M. Setyawan Anwar
14. Deti Sumiyati
15. Linda Mardia Sari
16. Lukman Hakim
17. Heru Santoso
18. Puthut Okky Mahendra
19. Istafiana Candarini
20. Ari Prasetyo

4. Pelatihan Budidaya dan Pengolahan Pasca Panen Tumbuhan Obat

Koordinator : Abdul Syakur

Anggota :

1. Asri Gayatri
2. Nur Asiah
3. Frita
4. Ilmiyana Rossian
5. Eni
6. Anita
7. Sri
8. Eka
9. Ibrahim Sumardi

10. Danu Haryono
11. M. Ikhsanudin
12. Resa Imano
13. Abdul Latief
14. Hadi Broto
15. Jati Sumarto P.
16. Arif Nugroho
17. Suwilin
18. Desna

